

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2016 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN TAHUN 2016

2.1 . Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

A. Aspek Geografi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat memiliki wilayah daratan seluas 3.709.528,44 ha dengan garis pantai sepanjang 724,85 km. Secara Geografis Provinsi Jawa Barat terletak pada posisi 104°48" - 108°48" Bujur Timur dan 5°50" - 7°50" Lintang Selatan dengan batas wilayahnya meliputi:

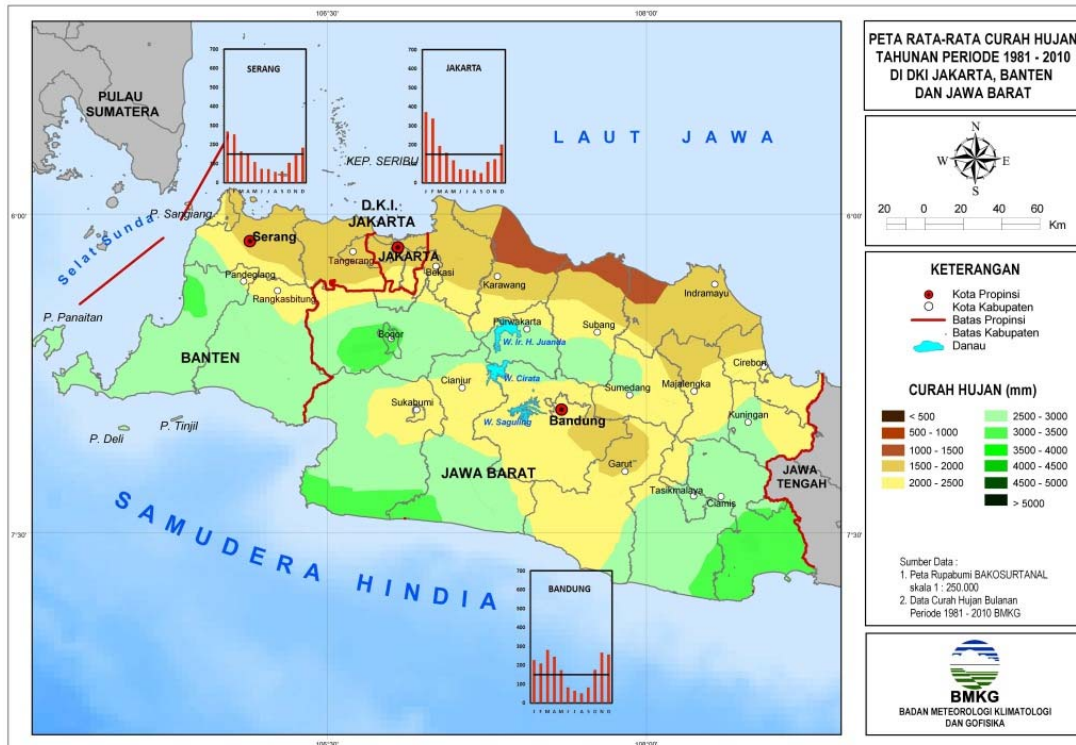
- Sebelah Utara, berbatasan dengan Laut Jawa dan Provinsi DKI Jakarta;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah;
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Samudera Indonesia;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan Provinsi Banten.

Secara administratif pemerintahan, wilayah Provinsi Jawa Barat terbagi ke dalam 27 kabupaten/kota, meliputi 18 kabupaten dan 9 Kota, yaitu Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Bandung Barat, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Indramayu, Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, dan Pangandaran serta Kota Bogor, Sukabumi, Bandung, Cirebon, Bekasi, Depok, Cimahi, Tasikmalaya dan Kota Banjar.

a. Curah Hujan dan Sumber Daya Air

Fenomena curah hujan di Jawa Barat menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dipengaruhi oleh tipologi *Monsun* yang secara umum memiliki pola hujan rata-rata bulanan dengan satu puncak hujan maksimum yaitu pada Januari atau Desember dan minimum pada bulan Agustus. Rata-rata hujan setiap bulan menunjukkan perbedaan yang jelas antara periode musim kemarau dengan curah hujan kurang dari 150 milimeter dan periode musim hujan dengan curah hujan lebih

dari 150 milimeter. Sebaran wilayahnya umumnya berada di selatan ekuator yang sensitif terhadap gerakan atau perubahan sistem angin monsun. Puncak hujan biasanya terjadi pada saat sistem monsun barat dominan melintasi wilayah tersebut.



Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), <http://bmkg.go.id>

Gambar 2.1Peta Rata-Rata Curah Hujan Periode 1981-2010

Jawa Barat menurut data BMKG di atas berada pada rentang curah hujan 1.000 - 4.000 mm per tahun dengan persebaran curah hujan terendah berada di wilayah Utara (pantura Bekasi s.d Cirebon dan Kuningan) dan sebagian wilayah Tengah Jawa Barat (Sukabumi, Cianjur, Bandung, dan Garut, dsk). Sedangkan sebaran curah hujan tinggi melingkupi wilayah Barat-Selatan (Bogor dan Sukabumi), wilayah Tengah (Purwakarta, Subang, Sumedang, dsk) serta wilayah Timur-Selatan (Tasikmalaya, Kuningan, Ciamis, dan Pangandaran).

Mencermati karakteristik curah hujan tersebut, maka perlu diperhitungkan secara seksama terkait ketersediaan air baku terutama di wilayah Utara Jawa Barat sebagai kawasan lahan pertanian pangan beririgasi teknis dan merupakan kawasan lumbung padi Nasional di saat

puncak kemarau. Sedangkan untuk wilayah Selatan, curah hujan yang tinggi perlu menjadi perhatian mengingat wilayah ini memiliki kerentanan terhadap bencana longsor dan gerakan tanah, sehingga pengelolaan/manajemen lahan berbasis konservasi menjadi hal penting untuk dilakukan.

Secara kewilayahan, potensi sumber daya air terdistribusi pada setiap Wilayah Sungai (WS) baik kewenangan Nasional/Pusat maupun kewenangan Provinsi. Wilayah sungai kewenangan pemerintah Pusat meliputi WS Ciliwung, WS Citarum, WS Cimanuk-Cisanggarung dan WS Citanduy. Sementara wewenang dan tanggung jawab pemerintah Provinsi Jawa Barat meliputi WS Cisadea-Cibareno, dan WS Ciwulan-Cilaki.

Tipologi curah hujan memiliki keterkaitan terhadap potensi sumber daya air pada aliran-aliran sungai yang ada di Provinsi Jawa Barat. Dari perhitungan curah hujan yang turun di bumi Jawa Barat sepanjang tahun, dapat menghasilkan potensi sumber daya air permukaan (sungai induk dan anak sungainya) mencapai rata-rata 48.023,78 juta m³/tahun dalam kondisi normal. Sementara itu, angka ketersediaan air permukaan berdasarkan debit 90 Tahunan (Q90) adalah sebesar 43.773,02 juta m³/tahun, berdasarkan debit 80 tahunan (Q80) adalah sebesar 37.095,83 juta m³/tahun, dan berdasarkan debit 50 tahunan (Q50) adalah sebesar 34.013,40 juta m³/tahun. Berdasarkan data ini, dapat dicermati bahwa dalam rentang waktu siklus SDA yang semakin pendek, menunjukkan bahwa ketersediaan air permukaan juga semakin menurun.

Tabel 2.1
Ketersediaan Sumber Daya Air Di Jawa Barat

NO	Wilayah Sungai	Luas(Km2)	Potensi SDA (Juta m ³ /thn)	Ketersediaan Air Permukaan (Juta m ³ /thn)		
				Q90	Q80	Q50
1	Ciliwung	3675.40	5538.62	9990.35	9011.32	7802.52
2	Cisadea-Cibareno	6693.60	10987.47	7586.62	5789.65	5618.55
3	Citarum	11436.90	12924.43	10724.80	7606.45	7243.98
4	Cimanuk - Cisanggarung	7157.50	7878.07	7111.68	5854.20	5851.24
5	Citanduy	2682.00	3542.59	3079.13	2613.87	2482.36
6	Ciwulan - Cilaki	5415.00	7152.60	5280.45	6220.33	5014.76
Total		37060.40	48023.78	43773.02	37095.82	34013.40

Sumber: Statistik SDA Tahun 2016, Dinas PSDA Prov. Jawa Barat

Fenomena menurunnya ketersediaan air permukaan di sungai-sungai Jawa Barat, perlu diwaspadai mengingat bahwa air permukaan dipergunakan untuk mengairi sawah-sawah irigasi. Semakin turun debit air permukaan, maka semakin sedikit areal sawah Jawa Barat yang dapat terairi. Hal ini juga akan berimbas pada pengisian tandon-tandon air (situ, embung, dan waduk) di Jawa Barat yang bergantung pada debit air permukaan tersebut. Sumber air permukaan (sungai dan anak sungai) serta infrastruktur sumber daya air di Jawa Barat dapat dicermati pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Sumber Air Dan Prasarana Sumber Daya Air

	Uraian		Kuantitas	Satuan
1	DAS		200	Buah
2	SUNGAI		3,506	Buah
		SUNGAI LINTAS	2,265	Buah
		LINTAS PROVINSI	4	Buah
		LINTAS KABUPATEN	2,267	Buah
		SUNGAI LOKAL	1,239	Buah
3	SITU		831	Buah
4	WADUK		20	Buah
5	EMBUNG		23	Buah
6	AREAL IRIGASI (LUAS SAWAH)		1,086,242	Ha
	Kewenangan Pusat		405,510	Ha
	Kewenangan Provinsi		100,600	Ha
	Kewenangan Kab/Kota		346,920	Ha
	Irigasi Desa		144,180	Ha
	Sawah Tadah Hujan		89,032	Ha

Sumber: Statistik SDA Tahun 2016, Dinas PSDA Prov. Jawa Barat

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh areal irigasi yang ada di Jawa Barat, sangat bergantung pada ketersediaan air permukaan yang memiliki kecenderungan menurun dari waktu ke waktu. Oleh karena itu aktivitas menyelamatkan wilayah tangkapan air serta konservasi setiap daerah aliran sungai menjadi penting dan harus dilakukan di setiap waktu.

b. Pesisir dan Laut

Secara geografis wilayah pesisir dan laut Provinsi Jawa Barat terbagi atas 2 wilayah, yaitu wilayah pantai utara (Pantura) dan wilayah pantai selatan (Pansela). Panjang Pantura adalah 417,5 km dan panjang Pansela adalah 399,32 km, sehingga luas wilayah lautan Jawa Barat sampai

wilayah 12 mil laut adalah 18.153 km². Panjang dan luas pesisir dan laut di Jawa Barat tersebut merupakan potensi ekonomi yang perlu direncanakan dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan perekonomian Jawa Barat tahun 2018.

Kondisi fisik dasar pesisir utara Jawa Barat yang terdiri atas dataran pantai dan rawa alluvial pantai dengan kemiringan lereng 0%-5%, merupakan daerah yang bertopografi landai, perairan dangkal, memiliki substrat lumpur, berpasir dan berawa, pola arus yang dipengaruhi arus laut Jawa, serta bervegetasi mangrove dan terumbu karang. Sungai-sungai yang bermuara ke Pantura diantaranya Sungai Cimanuk, Cipunagara, Citarum, Kali Bekasi, Pagadungan, Cilamaya, Ciasem, Kali Beji, Ciplanas, Cimanggis, Ciwaringin, Kali Bunder, Bangkaderes, dan Cisanggarung. Perairan laut relatif tenang menjadi lingkungan yang kondusif bagi perkembangan wilayah, dengan aktivitas sosial dan pertumbuhan ekonomi relatif berkembang cukup pesat.

Sementara di pesisir selatan meliputi kondisi yang berbukit dengan seismisitas relatif tinggi, bertopografi terjal, perairan dalam, memiliki substrat pasir dan karang, pola arus dipengaruhi arus Samudera Hindia, dan vegetasi cenderung berupa hutan pantai dan *mangrove*. Batimetri pantai umumnya curam dan berhadapan langsung dengan Samudera Hindia, sehingga menimbulkan gelombang laut yang besar, kadang-kadang gelombang badai (2-5 m), serta arus laut yang relatif kuat, menjadi kendala di dalam pengembangan wilayah. Selain itu, pemanfaatan pelayaran di wilayah ini memerlukan tingkat keamanan yang cukup tinggi.

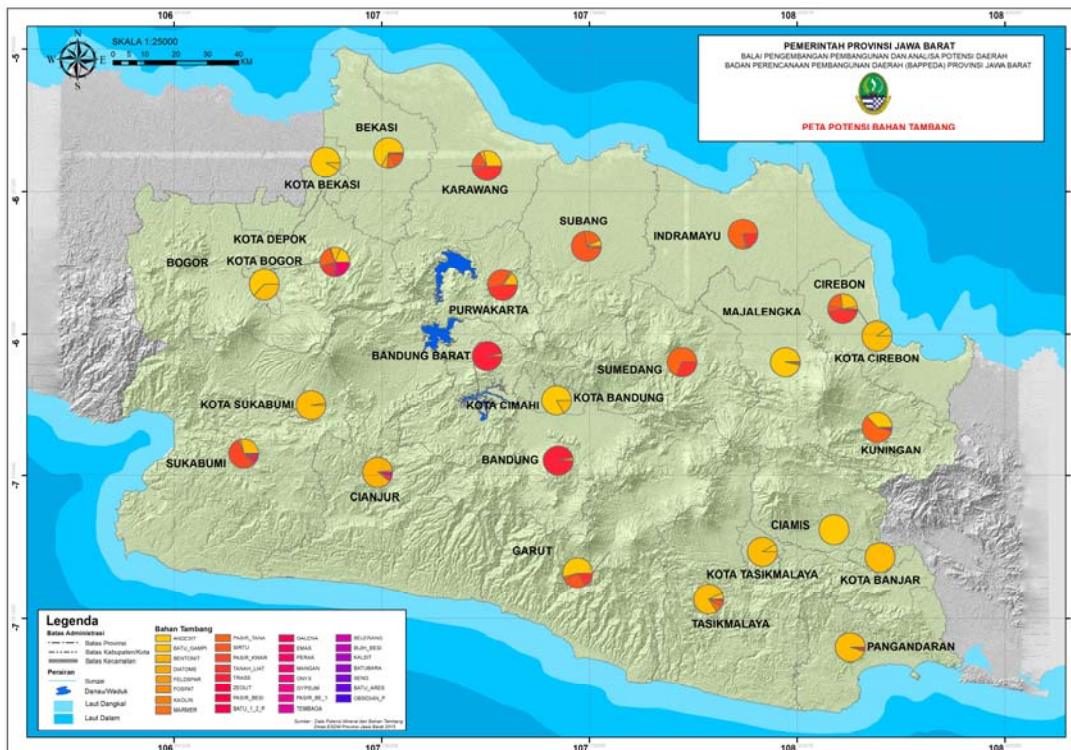
Perbedaan kondisi fisik tersebut menjadi faktor yang mempengaruhi ketimpangan perkembangan wilayah antara pesisir utara dan selatan. Sungai-sungai yang bermuara ke Pansela di antaranya sungai Citepus, Cimandiri, Cikaso, Cibuni, Cisokan, Cisadea, Ciujung, Cipandak, Cilaki, Cikandang, Cipalebuh, Cikaengan, Cisanggiri, Cipatujah, Ciwulan, Cimedang, Cijulang, dan Citanduy. Selain itu, wilayah Pansela ini terletak di Lempeng Eurasia dan Lempeng Australia yang merupakan zona aktif gempa dan berpotensi bencana tsunami. Ancaman lainnya adalah

gelombang laut pasang, akresi dan abrasi, sedimentasi yang besar di muara-muara sungai yang menyebabkan pendangkalan, penyumbatan aliran sungai, rawan banjir bandang, erosi sungai, dan terbentuknya delta baru. Abrasi yang telah terjadi sejak lama terdapat di Teluk Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi.

Wilayah pesisir dan laut Jawa Barat pun memiliki pulau-pulau kecil, di pesisir selatan pesisir Pulau Nusamanuk dan Batukolotok serta di pesisir utara, yaitu Gugusan Pulau Biawak.

c. Pertambangan

Jawa Barat memiliki potensi bahan tambang yang cukup besar, yang bila dimanfaatkan secara bijaksana dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, walaupun harus tetap memperhatikan konservasi dan lingkungan dalam proses eksloitasinya. Potensi bahan tambang ini untuk tahun 2018 nanti, diharapkan dapat dioptimalkan secara bijak untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan daerah Jawa Barat.



Gambar 2.1Peta Potensi Bahan Tambang Provinsi Jawa Barat
 Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

Potensi bahan tambang tersebar di 20 kabupaten se-Jawa Barat, meliputi bahan tambang berupa galian mineral logam, mineral industri, dan bahan galian konstruksi. Bahan-bahan tambang tersebut antara lain Andesit, Batu Gamping/Kapur, Bentonit, Diatome, Feldspar, Fospat, Kaolin, Marmer, Pasir+Tanah Urug, Sirtu, Pasir Kwarsa, Tanah Liat, Trass, Zeolit, Pasir Besi, Batu 1/2 Permata, Galena, Emas, Perak, Mangan, Onyx, Gypsum, Pasir Besi, Tembaga, Belerang, Bijih Besi, Kalsit, Batubara, Seng, Batu Ares, serta Obsidian/Perlit. Dapat dicermati pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Potensi Komoditas Tambang dan Wilayah Sebarannya

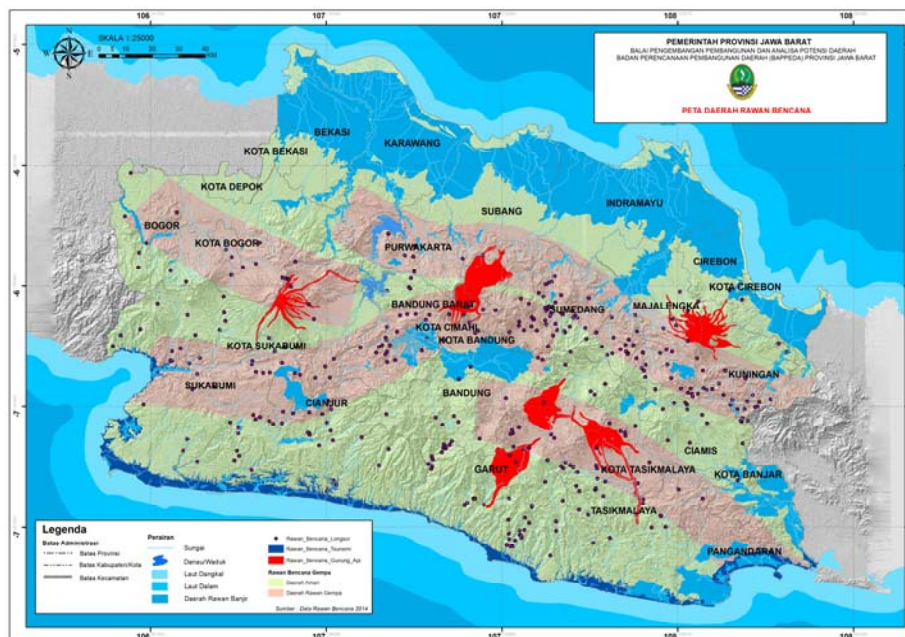
No.	Jenis Komoditas Tambang	Potensi Jumlah (Ton)	Wilayah Sebaran Komoditas Tambang
1	ANDESIT	10,124,796,963	CIANJUR, SUKABUMI, BOGOR, PURWAKARTA, KARAWANG, BEKASI, SUBANG, TASIKMALAYA, PANGANDARAN, GARUT, BANDUNG, BANDUNG BARAT, CIAMIS, CIREBON, KUNINGAN, SUMEDANG, MAJALENGKA
2	BATU GAMPING/ KAPUR	3,743,209,839	SUKABUMI, BOGOR, PURWAKARTA, KARAWANG, BEKASI, SUBANG, TASIKMALAYA, CIAMIS, CIREBON, KUNINGAN, SUMEDANG, MAJALENGKA
3	BENTONIT	329,604,075	CIANJUR, SUKABUMI, BOGOR, TASIKMALAYA, PANGANDARAN, GARUT, BANDUNG, BANDUNG BARAT, CIAMIS, KUNINGAN, SUMEDANG
4	DIATOME	25,552	BOGOR, KUNINGAN
5	FELDSPAR	26,339,972	CIANJUR, SUKABUMI, BOGOR, PURWAKARTA, TASIKMALAYA, PANGANDARAN
6	FOSPAT	524,160	SUKABUMI, BOGOR, TASIKMALAYA, PANGANDARAN, CIAMIS, CIREBON
7	KAOLIN	5,777,576	BOGOR, TASIKMALAYA, GARUT, CIAMIS, KUNINGAN, BANJAR, SUMEDANG
8	MARMER	172,276,288	SUKABUMI, TASIKMALAYA, BANDUNG, BANDUNG BARAT
9	PASIR+TANAH URUG	275,153,365,028	CIANJUR, SUKABUMI, BOGOR, PURWAKARTA, BEKASI, SUBANG, TASIKMALAYA, PANGANDARAN, GARUT, CIAMIS, CIREBON, INDRAMAYU, KUNINGAN, BANJAR, SUMEDANG, MAJALENGKA
10	SIRTU	1,601,991,429	CIANJUR, SUKABUMI, PURWAKARTA, KARAWANG, BEKASI, SUBANG, TASIKMALAYA, GARUT, BANDUNG, BANDUNG BARAT, CIAMIS, CIREBON, INDRAMAYU, KUNINGAN, BANJAR, MAJALENGKA
11	PASIR KWARSA	3,257,579,879	SUKABUMI, BOGOR, KARAWANG, BEKASI, BANDUNG, BANDUNG BARAT
12	TANAH LIAT	123,678,899,924	CIANJUR, SUKABUMI, BOGOR, PURWAKARTA, KARAWANG, BEKASI, SUBANG, TASIKMALAYA, PANGANDARAN, GARUT, BANDUNG, BANDUNG BARAT, CIAMIS, CIREBON, INDRAMAYU, KUNINGAN, BANJAR, SUMEDANG, MAJALENGKA
13	TRASS	2,454,950,551	CIANJUR, SUKABUMI, BOGOR, PURWAKARTA, SUBANG, PANGANDARAN, BANDUNG, BANDUNG BARAT, CIAMIS, CIREBON, KUNINGAN, MAJALENGKA
14	ZEOLIT	127,548,000	SUKABUMI, TASIKMALAYA, PANGANDARAN, CIAMIS, CIREBON
15	BATU 1/2 PERMATA	1,000,000	GARUT
16	GALENA	22,271	CIANJUR, CIAMIS
17	EMAS	9,342,173	BOGOR, PURWAKARTA, TASIKMALAYA, GARUT
18	PERAK	57,736,916	BOGOR
19	MANGAN	500,000	SUKABUMI, TASIKMALAYA, GARUT
20	ONYX	50,606,950	KUNINGAN
21	GYPSUM	6,451,205	SUBANG, TASIKMALAYA, BANJAR
22	PASIR BESI	125,682,674	CIANJUR, SUKABUMI, TASIKMALAYA, PANGANDARAN, GARUT
23	TEMBAGA	210	TASIKMALAYA
24	BELERANG	20,360,000	GARUT, BANJAR
25	BIJIH BESI	51,346,000	TASIKMALAYA, GARUT
26	KALSIT	2,701,600	PANGANDARAN, CIAMIS, KUNINGAN
27	BATUBARA	9,450,800	SUKABUMI, GARUT, CIAMIS, BANJAR
28	SENG	70,423	PURWAKARTA
29	BATU ARES	171,068	SUKABUMI
30	OBSIDIAN/PERLIT	5,640,000	SUKABUMI, GARUT

Sumber: Statistik ESDM Th. 2016, Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat diambil makna bahwa kekayaan bawah bumi Jawa Barat sangat berlimpah dan dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat di wilayah dimana komoditas tambang tersebut berada. Namun di sisi lain, eksploitasi secara sembarangan terhadap bahan tambang strategis akan berakibat pada kerusakan lingkungan yang fatal. Potensi tambang Jawa Barat harus dikelola secara berkelanjutan berdasarkan kaidah-kaidah pertambangan modern yang menjunjung tinggi kelestarian lingkungan.

d. Kebencanaan

Struktur geologis yang kompleks menjadikan sebagian wilayah Jawa Barat memiliki tingkat kerentanan ancaman bencana alam yang tinggi. Sumber-sumber potensi penyebab bencana alam yang perlu diwaspadai adalah 7 (tujuh) gunung api aktif, 5 (lima) sesar aktif serta aktivitas lempeng tektonik di selatan Jawa Barat. Sumber penyebab bencana lainnya adalah tingginya intensitas curah hujan yang memicu gerakan tanah terutama di wilayah Jawa Barat bagian selatan, serta banjir di wilayah pantai utara dan cekungan Bandung. Kawasan rawan bencana dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.2 Peta Kawasan Rawan Bencana Alam
Sumber: RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029

Bahaya lingkungan beraspek geologis yang sering terjadi, antara lain masalah kegempaan, letusan gunungapi dan aliran lahar, longsor (gerakan tanah), perubahan garis pantai dan erosi tebing sungai. Jawa Barat secara geologis terletak disebelah utara lajur pertemuan dua lempeng aktif yang saling bertumbukan, yaitu lempeng Indo-Australia dan lempeng Eropa-Asia. Tumbukan ini mengakibatkan wilayah Jawa Barat sering merasakan getaran dan dilanda gempa bumi tektonik serta letusan gunung api. Bencana gempa bumi guncangan tanah menempati urutan pertama sebagai bencana perusak, diikuti oleh gerakan tanah dan pelurukan. Patahan permukaan dan tsunami jarang terjadi disebabkan kekuatan gempabumi di Jawa Barat umumnya lebih kecil dari 6 pada Skala Richter. Gempabumi tektonik Jawa Barat berasal dari dua sumber, yakni sumber gempa bumi penunjaman dan sumber gempa bumi sesar aktif. Bencana dan risiko yang diakibatkan oleh kedua sumber gempa bumi tersebut, dikontrol oleh kekuatan gempa bumi, kedalaman gempa bumi, jarak pusat gempa bumi, kondisi geologi, kepadatan penduduk serta infrastruktur.

Selain bencana geologis, banjir juga menjadi ancaman di wilayah Jawa Barat disebabkan intensitas curah hujan yang tinggi dengan durasi di atas normal sehingga menghasilkan air limpasan yang melebihi daya dukung sistem drainase. Demikian pula, perubahan penggunaan lahan yang tidak terkendali serta kondisi geologi dan morfologi lahan menjadi lain bencana banjir. Beberapa wilayah rawan banjir terlihat pada Gambar 2.3 dengan konsentrasi berada di pesisir pantai utara Jawa Barat yang meliputi Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu, Cirebon (DAS Cimanuk dan Cipunagara) dan beberapa kecamatan di cekungan Bandung seperti Kecamatan Majalaya, Ciparay, Banjaran dan Dayeuh Kolot (DAS Citarum), serta Kecamatan Padaherang di Kabupaten Ciamis (DAS Citanduy).



Gambar 2.3 Peta Sebaran Daerah Rawan Banjir

Sumber: BPLHD Provinsi Jawa Barat, 2015

Bencana gerakan tanah (tanah longsor) merupakan peristiwa alam yang seringkali mengakibatkan kerusakan, baik berupa lingkungan maupun prasarana dan sarana fisik, serta menimbulkan kerugian yang tidak sedikit, baik harta maupun korban jiwa manusia. Jabar Selatan merupakan salah satu daerah yang sangat rawan dari gerakan tanah, hampir setiap saat mengalami bencana gerakan tanah dan menimbulkan kerusakan yang cukup besar. Pada umumnya bencana tanah longsor dipicu oleh turunnya curah hujan yang tinggi, disamping kondisi kelerengan lahan yang cukup terjal dan tidak tertutup oleh vegetasi serta sifat batuan atau tanah yang cukup sensitif terhadap kondisi keairan. Secara umum, daerah potensi longsor di Jawa Barat dapat dirangkum pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Tabel Daerah Rawan Longsor

No	Potensi Longsor	Lokasi
1	Menengah – Tinggi	Bogor (Jonggol, Citeureup, Nanggung), Sukabumi (Tegalbeuleud, Cidolog, Sagaranten, Jampang Tengah, Palabuhanratu, Parung Kuda), Cianjur (Pacet, Sukaesmi, Pagelaran, Tanggeung, Kadupandak, Cibinong, Argabintang, Naringgul, Campaka, Cibeber), Bandung (Gununghalu), Garut (Palegong, Cisewu, Pakenjeng, Cisompet), Purwakarta (Wanayasa, Sukatani, Plered), Subang (Sagalaherang), Sumedang (Tomo, Cadasngampar, Paseh, Congeang, Buah Dua, Tanjungkerta, Cibugel), Tasikmalaya (Bantarkalong, Sodonghilir, Cibalong, Taraju, Salawu, Salopa, Cikatomas), Ciamis (Langkaplancar, Tambaksari, Cisaga, Panawangan), Majalengka (Talaga, Maja, Rajagaluh, Argapura, Sukahaji, Majalengka, Bantarujeg), Kuningan (Mandirancan, Cilimus, Subang, Selajambe, Cidahu), Cirebon (Palimanan, Sumber, Karangsembung, Ciwaringin)
2	Menengah	Bogor (Caringin, Cariu), Sukabumi (Cibadak, Nyalindung), Cianjur (Pacet, Sukaesmi, Pagelaran, Tanggeung, Kadupandak, Cibinong, Argabinta, Naringgul, Campaka, Cibeber), Bandung (Rongga, Cililin, Cipongkor, Parongpong, Pangalengan, Arjasari, Cipatat), Garut (Bungbulang, Bayongbong, Banjarwangi), Purwakarta (Bojong, Jatiluhur), Subang (Cisalak, Cijambe), Sumedang (Wado, Sumedang Selatan), Tasikmalaya (Pager Ageung), Ciamis (Cihaurbeuti), Majalengka (Lemah Sugih), Kuningan (Ciniru, Ciwaru), Cirebon (Beber, Waled, Sedong)

Sumber: Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (2005).

Sementara itu, BNPB menetapkan skor indeks resiko bencana tanah longsor pada semua wilayah administratif di Jawa Barat sebagaimana perincian pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Tabel Indeks Risiko Bencana Tanah Longsor Provinsi Jawa Barat

No	Peringkat Nasional	Kab/Kota	Skor	Kelas Resiko	Ket
1.	1	Kab. Garut	36	Tinggi	
2.	53	Kab. Bogor	24	Tinggi	
3.	54	Kab. Bandung	24	Tinggi	
4.	56	Kab. Sukabumi	24	Tinggi	
5.	58	Kab. Cianjur	24	Tinggi	
6.	60	Kab. Tasikmalaya	24	Tinggi	
7.	63	Kab. Ciamis	24	Tinggi	
8.	64	Kab. Bandung Barat	24	Tinggi	
9.	67	Kab. Subang	24	Tinggi	
10.	72	Kab. Majalengka	24	Tinggi	
11.	75	Kab. Sumedang	24	Tinggi	
12.	77	Kab. Kuningan	24	Tinggi	
13.	90	Kab. Purwakarta	24	Tinggi	
14.	152	Kota Sukabumi	24	Tinggi	
15.	274	Kota Bandung	22	Tinggi	
16.	301	Kab. Bekasi	12	Tinggi	
17.	302	Kab. Cirebon	12	Tinggi	
18.	303	Kab. Karawang	12	Tinggi	
19.	306	Kab. Indramayu	12	Tinggi	
20.	409	Kota Banjar	12	Sedang	
21.	451	Kota Bogor	12	Sedang	
22.	460	Kota Bekasi	11	Sedang	
23.	464	Kota Depok	11	Sedang	
24.	474	Kota Cirebon	11	sedang	

Sumber: Indeks Resiko Bencana Indonesia, BNPB 2013

Erosi pada tebing sungai dapat berupa longsor dan runtuh, umumnya terjadi pada alur sungai yang membelok. Erosi terjadi pada tebing busur luar tikungan yang selalu dihantam oleh kekuatan arus air sungai. Pada daerah dataran lanjutan proses erosi ini membentuk meander. Selain itu, perbuatan manusia dapat mempercepat proses erosi, seperti di sekitar lokasi penambangan batu kali. Seperti pada sungai Cimandiri, Sukabumi yang telah mengancam dan menghancurkan rumah penduduk di tepi sungai. Pengambilan bongkahan batu kali dapat mempercepat arus sungai, sehingga kekuatan arus menghantam tebing lebih kuat dan terjadi lekukan pada kaki tebing sungai.

Daerah Jabar Selatan secara geologis rentan terhadap bencana alam pesisir, seperti tsunami. Walaupun jarang terjadi, namun daya hancurnya yang besar harus diperhitungkan. Tsunami umumnya disebabkan oleh gempa bumi dasar laut. Sekitar 70% gempa bumi tektonik terjadi di dasar laut yang berpotensi menyebabkan tsunami (tsunamigenik). Terjadinya tsunami apabila magnituda gempa lebih besar dari 6 skala richter,

gerakan kulit bumi ke arah atas (*up thrusting*) dan kedalaman gempa bumi kurang dari 80 kilometer, memiliki topografi dasar laut relatif landai (lebih kecil dari 600). Jika jarak sumber gempa terhadap pantai di semua kelompok pantai rata-rata kurang dari 300 kilometer dan kecepatan rambat tsunami mencapai 600-700 kilometer per jam, maka tsunami datang dengan sangat cepat, kurang dari setengah jam setelah gempa mengguncang. Untuk memperkecil resiko tersebut perlu dikembangkan manajemen bencana alam terutama pada tahap mitigasi bencana yang dikaitkan dengan rencana tata ruang yang didasarkan pada peta rawan bencana alam.

B. Aspek Demografi

Kondisi demografis Jawa Barat secara umum tercermin melalui jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, struktur penduduk, sebaran penduduk serta ketenagakerjaan. Berdasarkan hasil proyeksi BPS, jumlah penduduk Jawa Barat pada tahun 2016 mencapai 47.379.389 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 1,43 persen, menurun sebesar 0,02 persen bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2015.

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2016

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN			
		2013	2014	2015	2016
Demografi					
1. Jumlah Penduduk	Jiwa	45.340.800	46.029.699	46.709.569	47.379.389
a. Laki-laki	Jiwa	23.004.300	23.345.033	23.690.167	24.011.089
b. Perempuan	Jiwa	22.336.500	22.684.636	23.019.402	23.368.100
2. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	1,77	1,52	1,47	1,43
3. Kepadatan Penduduk	jiwa per km ²	1.282	1.301	1.320	1.339

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat..

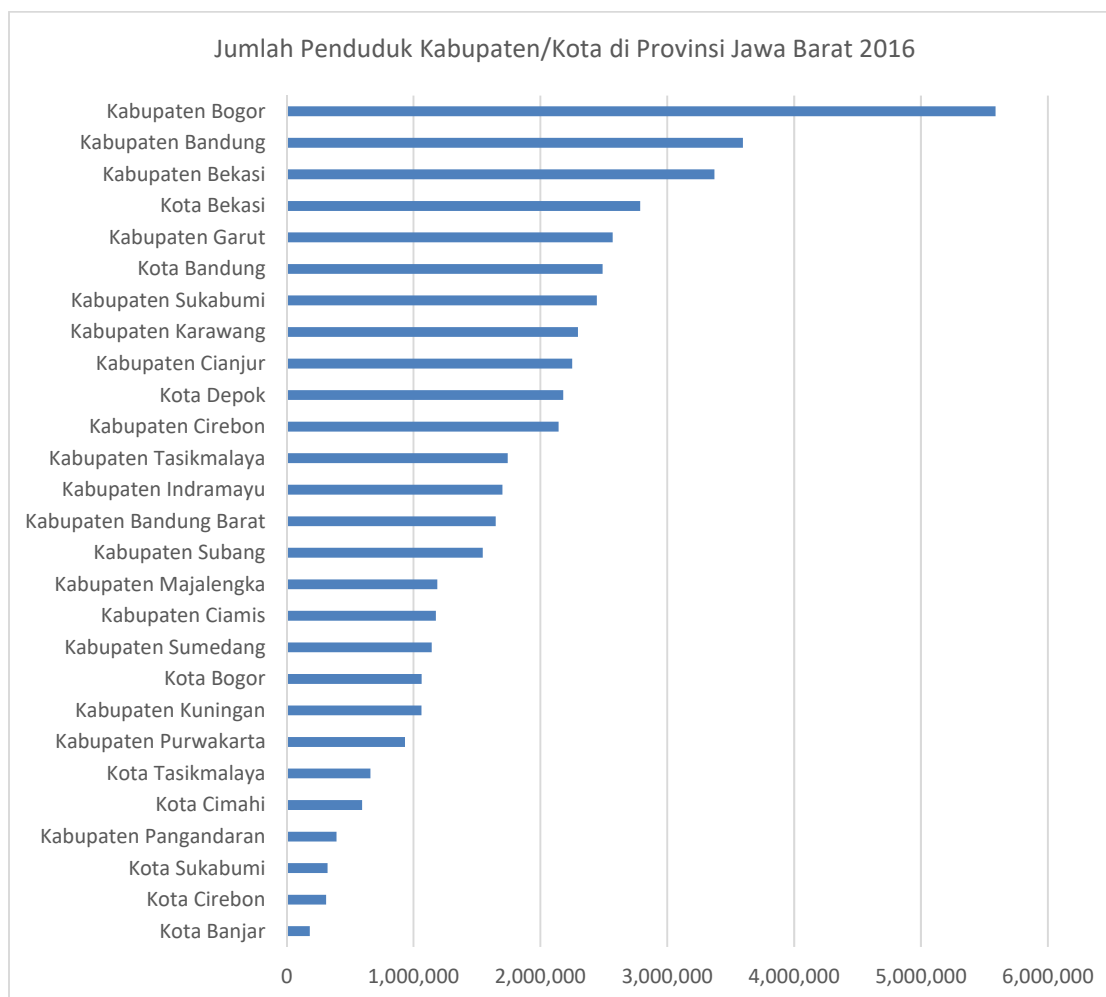
Rasio jenis kelamin di Jawa Barat pada tahun 2013 – 2016 sebesar 103, yang menunjukkan bahwa jumlah laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah perempuan. Sementara itu, kepadatan penduduk di Jawa Barat terus meningkat, dari 1.320 jiwa per km² pada tahun 2015 menjadi 1.339 jiwa per km²

Penduduk terbanyak pada 2016 berada di Kabupaten Bogor, sebanyak 5.587.390 jiwa atau 11,79 %, dan yang paling sedikit di Kota Banjar, sebanyak 181,901 jiwa atau 0,38% dari total jumlah penduduk Jawa Barat. Berdasarkan tingkat kepadatan penduduk, angka tertinggi berada di Kota Bandung, 14.805 orang/km², dan terendah di Kabupaten Pangandaran, 389 orang/ km². Jumlah penduduk dan tingkat kepadatan di kabupaten/kota tergambar pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Dan Kepadatan Penduduk
Menurut Kabupaten/Kota Di Jawa Barat, Tahun 2016

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah		Penduduk (orang)		Kepadatan Penduduk (Orang/Km ²)
		Km ²	% Terhadap Luas Jawa Barat	Jumlah	% Terhadap Penduduk Total Jawa Barat	
1	Kabupaten Bogor	2,710.62	7.66	5,587,390	11.79	2,061
2	Kabupaten Sukabumi	4,145.70	11.72	2,444,616	5.16	590
3	Kabupaten Cianjur	3,840.16	10.85	2,250,977	4.75	586
4	Kabupaten Bandung	1,767.96	5.00	3,596,623	7.59	2,034
5	Kabupaten Garut	3,074.07	8.69	2,569,505	5.42	836
6	Kabupaten Tasikmalaya	2,551.19	7.21	1,742,276	3.68	683
7	Kabupaten Ciamis	1,414.71	4.00	1,175,389	2.48	831
8	Kabupaten Kuningan	1,110.56	3.14	1,061,886	2.24	956
9	Kabupaten Cirebon	984.52	2.78	2,142,999	4.52	2,177
10	Kabupaten Majalengka	1,204.24	3.40	1,188,004	2.51	987
11	Kabupaten Sumedang	1,518.33	4.29	1,142,097	2.41	752
12	Kabupaten Indramayu	2,040.11	5.77	1,700,815	3.59	834
13	Kabupaten Subang	1,893.95	5.35	1,546,000	3.26	816
14	Kabupaten Purwakarta	825.74	2.33	932,701	1.97	1,130
15	Kabupaten Karawang	1,652.20	4.67	2,295,778	4.85	1,390
16	Kabupaten Bekasi	1,224.88	3.46	3,371,691	7.12	2,753
17	Kabupaten Bandung Barat	1,305.77	3.69	1,648,387	3.48	1,262
18	Kabupaten Pangandaran	1,010.00	2.85	392,817	0.83	389
19	Kota Bogor	118.50	0.33	1,064,687	2.25	8,985
20	Kota Sukabumi	48.25	0.14	321,097	0.68	6,655
21	Kota Bandung	167.67	0.47	2,490,622	5.26	14,854
22	Kota Cirebon	37.36	0.11	310,486	0.66	8,311
23	Kota Bekasi	206.61	0.58	2,787,205	5.88	13,490
24	Kota Depok	200.29	0.57	2,179,813	4.60	10,883
25	Kota Cimahi	39.27	0.11	594,021	1.25	15,127
26	Kota Tasikmalaya	171.61	0.49	659,606	1.39	3,844
27	Kota Banjar	113.49	0.32	181,901	0.38	1,603

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2016



Gambar 2.4 Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kondisi umum kesejahteraan masyarakat Jawa Barat dapat dilihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai barometer indikasi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan

gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Berdasarkan metode perhitungan baru yang dilakukan BPS, IPM Jawa Barat meningkat dari 69,50 pada tahun 2015 menjadi 70,19 poin pada tahun 2016 dan termasuk kelompok menengah ke atas. Peningkatan IPM tersebut tidak terlepas dari peningkatan seluruh komponen indikator IPM Jawa Barat, yaitu Indeks Kesehatan dari 80,63 poin menjadi 81,65 poin; Indeks Pendidikan dari 59,95 poin menjadi 61,39 poin; serta Indeks Pengeluaran yang meningkat dari 68,69 poin menjadi 69,51 poin. Peningkatan tertinggi terjadi pada Indeks Pendidikan sebesar 1,44 poin terutama karena keberhasilan meningkatkan angka Harapan Lama Sekolah (HLS), yang menggambarkan partisipasi sekolah dari penduduk usia sekolah, dari 12,15 tahun pada tahun 2015 menjadi 12,62 tahun pada tahun 2016.

Tabel 2.7

Capaian Indeks Pembangunan Manusia dan Komponennya Tahun 2014-2016

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN			
		2014 Metode Lama	2014 Metode Baru	2015	*2016
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	74,28	68,80	69,50	70,19
Indeks Kesehatan (IK)	Poin	74,01	80,35	80,63	81,05
- Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	69,02	72,23	72,41	72,68
Indeks Pendidikan (IP)	Poin	83,36	59,26	59,95	61,39
- Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	-	12,08	12,15	12,62
- Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	tahun	8,29	7,71	7,86	7,90
Indeks Pengeluaran	Poin	65,47	68,45	68,69	69,51
- Pengeluaran Perkapita	ribu rupiah	644.36	9.447,16	9.777,61	9.796.76

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat

*) Angka sementara perhitungan IPM BP2APD 2017

Meningkatnya capaian Indeks Kesehatan di Jawa Barat, tidak terlepas dari program-program pembangunan yang dilaksanakan pada sektor kesehatan. Pada aspek penyakit menular, Jawa Barat menempati peringkat empat besar di Asia untuk kasus Epidemic HIV & AIDS. Untuk mengatasi penyakit menular tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menerbitkan Peraturan Daerah No. 12/2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS, yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan HIV dan AIDS di Jawa Barat. Menindaklanjuti Perda tersebut, Pemerintah Jawa Barat telah meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana kesehatan, melalui peningkatan kapasitas puskesmas dengan menempatkan tenaga dokter spesialis dan bidan di setiap desa.

Pelayanan kesehatan terhadap masyarakat di Jawa Barat selain melalui jaminan kesehatan masyarakat miskin yang dibiayai oleh pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan bantuan keuangan pelayanan kesehatan masyarakat miskin nonkuota melalui Jamkesda, pelayanan kesehatan di RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat, Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat, dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat.

Kesehatan difokuskan kepada peningkatan kualitas dan derajat kesehatan masyarakat, khususnya dalam menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) melalui pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kesehatan agar Puskesmas mampu PONEB sebanyak 425 Unit yang tersebar di 27 Kabupaten/Kota. Kegiatan lain yang dapat menaikkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara langsung adalah penempatan 77 orang dokter PTT, 14 orang dokter gigi PTT, 751 orang bidan PTT, dan 6 Orang dokter spesialis PTT, 35 orang perawat, 26 orang sanitarian, 22 orang nutrisionis, 27 orang farmasis, dan 21 orang analis kesehatan, sehingga jumlahnya sebanyak 979 orang tenaga medis di kota/kabupaten. Disamping itu dilaksanakan program revitalisasi posyandu berupa pemberian bantuan operasional kepada 34.107 posyandu aktif.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan melalui alokasi pembiayaan sebesar 20% dari total APBD, yang dialokasikan untuk: (1) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diberikan kepada jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK/MA), baik sekolah negeri maupun swasta dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 1.572.791 Siswa; (2) Pembangunan ruang kelas baru (RKB) bagi SMP Negeri sebanyak 206 ruang, 662 ruang bagi SMP/MTs Swasta, dan SMA/SMK/MA Swasta sebanyak 1.620 ruang, serta SMA/SMK Negeri sebanyak 400 ruang untuk meningkatkan daya tampung siswa; (3) Peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidik di daerah terpencil sebanyak 3.292 orang guru; serta (4) Inisiasi penyelenggaraan pendidikan multikampus bagi ITB di Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Bekasi serta IPB di Kota Sukabumi dalam rangka meningkatkan akses masyarakat jenjang ke perguruan tinggi.

Pembangunan perekonomian Jawa Barat telah dilaksanakan secara optimal, ditunjukkan dengan capaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku sebesar 1.275,55 triliun rupiah pada tahun 2016 dan memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar 13,32 persen. Capaian lainnya adalah laju pertumbuhan ekonomi pada 2016 sebesar 5,67 persen, di atas rata-rata Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional sebesar 5,02 persen. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi daerah, pendapatan perkapita masyarakat, yang didekati melalui PDRB per kapita, meningkat dari 32,65 juta rupiah pada tahun 2015 menjadi 34,88 juta rupiah pada tahun 2016. Laju inflasi di Jawa Barat pun dapat dijaga pada tingkat 2,75 persen pada tahun 2016. Namun demikian, laju pertumbuhan ekonomi yang cukup baik belum dapat diimbangi dengan pemerataan pendapatan masyarakat. Hal ini ditandai dengan angka indeks gini sebesar 0,41 yang lebih tinggi dari angka indeks gini nasional sebesar 0,394.

Tabel 2.8**Indikator Makro Ekonomi Dan Ketimpangan Tahun 2015-2016**

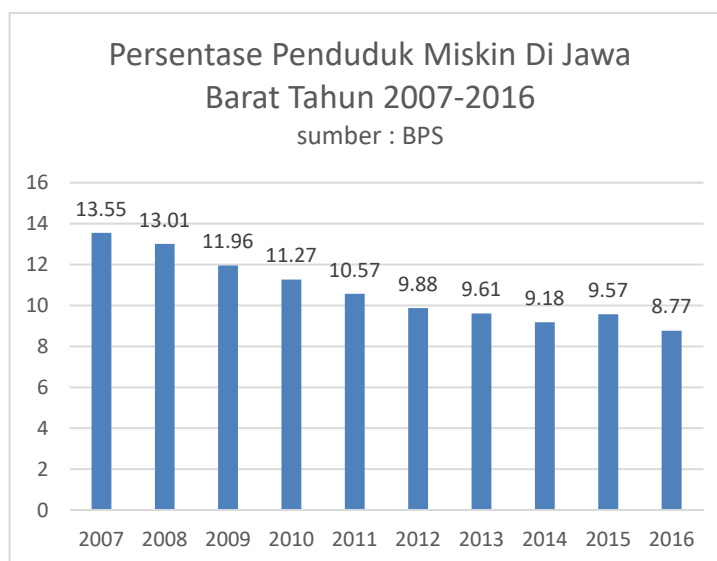
NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
			2015	2016
1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)			
	a. Nilai PDRB :			
	a.1 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	triliun rupiah	1.525,15	1.652,59
	a.2 Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) ¹⁾	triliun rupiah	1.207,00	1.275,55
	b. PDRB per Kapita :			
	b.1 PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	juta rupiah	32.65	34.88
	b.2 PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) ¹⁾	juta rupiah	25.84	26.92
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,06	5,67
3	Inflasi	Persen	2,73	2,75
4	Indeks Gini	Poin	0,41	0,41

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2017

* Menggunakan Perhitungan Dasar Tahun 2010

B. Fokus Kesejahteraan Sosial

Upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Jawa Barat dilakukan melalui penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran terbuka. Pada aspek penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 13,55 persen pada tahun 2007 menjadi 8,77 persen pada tahun 2016 (gambar 2.5). Upaya penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Jawa Barat, yang secara simultan dilaksanakan dalam rangka mencapai target Indikator Kinerja Daerah khususnya indikator pada aspek kesejahteraan masyarakat yang mencakup upaya dalam bidang ekonomi non pertanian, ekonomi pertanian, pendidikan, kesehatan, dan program keluarga berencana, serta prasarana pendukungnya.



Gambar 2.5 Persentase Penduduk Miskin Di Jawa Barat Tahun 2007-2016

Sumber: BPS, 2017

Berdasarkan gambar 2.5 terlihat bahwa penurunan tingkat kemiskinan pada tahun 2015-2016 mencapai 0,8 persen, lebih tinggi dibandingkan penurunan tingkat kemiskinan di nasional yang sebesar 0,43 persen atau dari 11,13 persen pada tahun 2015 menjadi 10,70 persen di tahun 2016. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlambatan penurunan kemiskinan di Jawa Barat dari target yang telah ditetapkan tidak terlepas dari kondisi makro ekonomi nasional, hal ini diperkuat dengan terjadinya kenaikan harga pangan terutama beras sebagai komponen utama konsumsi masyarakat miskin sebesar 29 persen dari 65 persen bahan makanan pada penghitungan garis kemiskinan dari bulan Februari – September 2016.

Ditinjau dari ketenagakerjaan, pada Tahun 2016 terjadi peningkatan penduduk usia kerja, angkatan kerja, dan penduduk bekerja dibanding Tahun 2015, sedangkan pengangguran dan tingkat partisipasi angkatan kerja terjadi penurunan. Hal ini menunjukkan peningkatan kinerja pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam upaya penciptaan lapangan kerja (Tabel 2.9).

Tabel. 2.9**Data Ketenagakerjaan Jawa Barat Tahun 2014 - 2016**

Indikator	Satuan	Tahun		
		2014	2015	2016
Ketenagakerjaan				
a. Penduduk Usia Kerja (15 tahun keatas)	juta orang	33,47	34,12	34.75
b. Penduduk Angkatan Kerja	juta orang	21,01	20,59	21.08
c. Penduduk Bekerja (15 tahun keatas)	juta orang	19,23	18,79	19.20
d. Penganggur (Mencari Kerja)	juta orang	1,78	1,75	1.87
e. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	62,77	60,34	60.65
f. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	8,45	8,72	8.89
g. Tingkat Kesempatan Kerja	Persen	91,55	91,28	91,11

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat 2014, 2015 & 2016

a. Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang terlibat aktif dalam kegiatan perekonomian meliputi penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan. Jumlah angkatan kerja di Jawa Barat pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebanyak 490 ribu orang (tumbuh sebesar 2,4 persen) yaitu dari 20,59 juta orang pada tahun 2015 menjadi 21,08 juta orang pada tahun 2016. Kenaikan angkatan kerja tersebut disebabkan oleh bertambahnya penduduk usia kerja sebesar 630 ribu orang atau tumbuh sebesar 1,85 persen dari tahun 2015 ke tahun 2016. Dengan demikian terdapat sebanyak 140 ribu orang Penduduk Usia Kerja yang tidak terlibat aktif dalam kegiatan perekonomian atau berada dalam kelompok Bukan Angkatan Kerja, seperti sekolah, mengurus rumah tangga.

Penduduk Usia Kerja yang juga masih termasuk dalam usia sekolah namun tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi akan menjadi beban ketenagakerjaan apabila tidak didukung oleh penyediaan lapangan kerja dan kompetensi dari angkatan kerja tersebut.

b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (15 Tahun ke atas). Untuk melihat kontribusi serta dinamika tenaga kerja dan pencari kerja dalam pasar kerja, para pembuat kebijakan dapat mencermati indikator ketenagakerjaan, diantaranya adalah TPAK. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

TPAK Jawa Barat terjadi peningkatan dari 60,34 persen pada tahun 2015 menjadi 60,65 persen pada tahun 2016 atau naik sebesar 0,31 persen. Hal ini berarti terdapat 61 orang dari 100 orang penduduk usia kerja yang berpartisipasi aktif dalam perekonomian pada tahun 2016, sisanya lebih banyak yang melakukan kegiatan lain seperti sekolah, mengurus rumah tangga, dan kegiatan lain yang tidak bernilai ekonomi.

c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yaitu penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan suatu usaha baru, tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (*discouraged workers*), atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja/mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (*future starts*). TPT berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru, dan sebagai indikator dalam keberhasilan program ketenagakerjaan. TPT dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang tergolong penganggur, dengan jumlah penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja.

Pada periode Agustus 2015-2016, TPT Jawa Barat mengalami peningkatan dari 8,72 persen pada Tahun 2015 menjadi 8,89 persen pada Tahun 2016. Artinya, dari 100 orang angkatan kerja Jawa Barat, sekitar 9

orang di antaranya yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan ataupun sedang mempersiapkan suatu usaha.

Peningkatan TPT disebabkan oleh (a) meningkatnya jumlah angkatan kerja; (b) tidak sebandingnya peningkatan partisipasi angkatan kerja dengan jumlah angkatan kerja yang berakibat terhadap tersedianya kesempatan kerja. Di samping itu, kondisi ini disebabkan oleh menurunnya sektor-sektor yang menyerap banyak tenaga kerja seperti sektor pertanian, pertambangan, industri dan konstruksi (seperti yang terlihat pada tabel 2.11).

d. Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan untuk diisi oleh para pencari kerja. Namun bisa diartikan juga sebagai permintaan atas tenaga kerja. Indikator persentase kesempatan kerja merupakan komplemen dari persentase pengangguran terbuka. Kegunaan indikator ini adalah untuk mengukur seberapa besar persentase penyerapan tenaga kerja. Jika persentase kesempatan kerja semakin tinggi maka penyerapan terhadap angkatan kerja akan semakin baik, atau pemenuhan dan perluasan kesempatan kerja bagi daerah yang bersangkutan dapat dikategorikan berhasil. Sebaliknya jika persentase kesempatan kerja itu rendah maka pengangguran akan meningkat.

Tinggi rendahnya persentase kesempatan kerja dipengaruhi oleh beberapa komponen pokok, seperti kondisi perekonomian, pertumbuhan penduduk, produktivitas/kualitas sumber daya manusia, persentase upah, dan struktur umur penduduk. Persentase kesempatan kerja di Jawa Barat pada Tahun 2016 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, pada tahun 2015 penyerapan tenaga kerja sebesar 91,28 persen turun sebesar 0,17 persen menjadi 91,11 persen pada Tahun 2016.

Penurunan kesempatan kerja ini disebabkan oleh kurang sebandingnya penyediaan lapangan kerja dengan jumlah angkatan kerja di Jawa Barat. Hal ini bisa disebabkan oleh berbedanya kebutuhan lapangan kerja dengan kompetensi yang dimiliki angkatan kerja.

e. Status dan Lapangan Pekerjaan Utama

Berdasarkan status pekerjaan utama, persentase penduduk Jawa Barat sebagian besar masih merupakan buruh/karyawan (47.34%). Status pekerjaan utama pada aspek berusaha sendiri pada 2016 terjadi penurunan walaupun hanya 0.01% dibanding 2015. Sementara pada aspek buruh/karyawan terjadi peningkatan sebesar 1.1% (Tabel 2.10).

Tabel 2.10
Jumlah Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja
Menurut Status Pekerjaan Utama Tahun 2015 - 2016

Status Pekerjaan Utama	Agustus 2015		Agustus 2016	
	Jumlah	%	Jumlah	%
1. Berusaha Sendiri	3.411.074	18,15	3.482.438	18.14
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap	1.971.380	10,49	1.983.549	10.33
3. Berusaha dibantu buruh tetap	633.037	3,37	770.741	4.01
4. Buruh / Karyawan	8.689.172	46,24	9.090.674	47.34
5. Pekerja Bebas	2.750.912	14,16	2.648.772	13.79
6. Pekerja Keluarga	1.335.907	7,11	1.225.864	6.38
Total	18.791.482	100	19.202.038	100

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan lapangan pekerjaan utama, dalam kurun waktu 2015 – 2016 terjadi trend penurunan jumlah penduduk yang bekerja pada dua sektor utama, yaitu sektor industri dan pertanian (Tabel 2. 11.). Kondisi ini disebabkan oleh keadaan ekonomi global dan nasional. Walaupun secara persentase, kedua sektor tersebut masih merupakan sektor penyerap tenaga kerja terbanyak, namun menunjukkan bahwa daya serap tenaga kerja pada sektor industri dan pertanian mengalami penurunan.

Tabel 2.11
Jumlah Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja
Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2015 – 2016

Lapangan Pekerjaan Utama	Kondisi			
	Agustus 2015		Agustus 2016	
	Jumlah	%	Jumlah	%
1. Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Perburuan	3.095.547	16,47	3.154.509	16.43
2. Pertambangan dan Penggalian	136.943	0,73	113.601	0.59
3. Industri	3.945.316	21,00	3.884.668	20.23
4. Listrik, Gas dan Air	68.478	0,36	60.971	0.32
5. Konstruksi	1.691.596	9,00	1.424.529	7.42
6. Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	5.101.162	27,15	5.338.698	27.80
7. Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	1.036.915	5,52	1.112.414	5.79
8. Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	669.791	3,56	814.691	4.24
9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perseorangan	3.045.734	16,21	3.297.038	17.18
Total	875.212	100	989.263	100

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat 2015

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum meliputi urusan bidang: pendidikan; sosial; koperasi dan UMKM; pekerjaan umum; energi dan sumber daya mineral; dan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian.

Pada bidang pendidikan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan melalui alokasi pembiayaan sebesar 20 persen dari total APBD, untuk: (1) bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang pendidikan dasar dan menengah, baik sekolah negeri maupun swasta; (2) pembangunan ruang kelas baru (RKB)

bagi SMP/MTs, SMA/MA dan SMK; dan (3) peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidik dan kependidikan.

Pembangunan di bidang sosial ditunjukkan dengan upaya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) melalui sistem pelayanan dalam panti dan luar panti berbasis masyarakat atau komunitas. Pada 2016 jumlah PMKS yang ditangani sebanyak 643.618 orang, dan penguatan Potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS), serta penanganan kasus pekerja anak sebanyak 192.288 orang.

Pembangunan pada bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan melalui peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap manfaat kredit modal usaha, dari 7.250 orang menjadi 8.365 orang pada 2015, dengan penciptaan wirausaha baru pada 2016 mencapai 20.997 orang.

Bidang Pekerjaan Umum dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang ditujukan untuk meningkatkan perekonomian Jawa Barat sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur sumber daya air monumental yang selesai pada 2016 adalah telah diresmikan dan digenangi Waduk Jatigede. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bidang pekerjaan umum Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur No 500 Tahun 2014 tentang fokus pelaksanaan pembangunan di Jawa Barat yang terdiri atas 37 program dan kegiatan unggulan Provinsi Jawa Barat, yang terkait pekerjaan umum, yakni peningkatan infrastruktur desa dan perdesaan, rehab 100 ribu rumah rakyat miskin, cetak sawah baru 100.000 ha, perbaikan dan pengelolaan jaringan irigasi terpadu, pembangunan tol dan jalan lintas cepat, persiapan pembangunan *aerotropolis* (Bandara Internasional Jawa Barat dan *Aerocity* Kertajati).

Kinerja program infrastruktur tersebut ditunjukkan dengan meningkatnya tingkat kondisi, baik jaringan irigasi di daerah irigasi kewenangan provinsi menjadi sebesar 69,65%, cakupan pelayanan air limbah domestik sebesar 65,03%, cakupan pelayanan persampahan perkotaan sebesar 65,65%, cakupan pelayanan air minum sebesar

67,13%, tingkat kemantapan jalan provinsi (kondisi baik dan sedang) sebesar 97,80% pada 2016.

Tingkat kemantapan jalan merupakan hasil pembangunan jalan sepanjang 3,91 km, peningkatan jalan sepanjang 28,24 km, penggantian jembatan sepanjang 112,30 m, rehabilitasi jalan sepanjang 102,69 km, rehabilitasi jembatan sepanjang 312,10 m dan pemeliharaan jalan pada semua jaringan jalan provinsi sepanjang 2.198,19 km. Di samping itu pemerintah provinsi telah membantu pemerintah kabupaten/kota dalam memperbaiki jalan kabupaten/kota, serta membangun dan memperbaiki 23 jembatan gantung.

Urusan energi dan sumber daya mineral terdiri dari 3 program, yaitu : (1) Program Pengembangan Panas Bumi dan Migas yang memproduksi di 6 (enam) wilayah kerja; (2) Program Pembinaan dan Pengembangan Urusan Ketenagalistrikan dan Energi dengan capaian rasio elektrifikasi rumah; (3) Program Pembinaan, Pengembangan Sumber Daya Mineral Geologi dan Air Tanah.

Keberhasilan pada pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian, ditunjukkan dengan pencapaian skala kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintahan yang berada pada skala 3 atau baik; indeks persepsi korupsi yang ditargetkan sebesar 6,5 poin pada 2016, dari capaian 3,7 poin pada 2015; skala komunikasi organisasi pemerintahan mencapai kategori baik dengan indeks sebesar 2,74; partisipasi masyarakat dalam pilihan kepala daerah pada 2015 berada dalam kondisi baik, sebesar 62,58 persen dari target 63 persen, lebih rendah dibandingkan dengan 2014 sebesar 71,30 persen; indeks demokrasi Jawa Barat yang dicapai sebesar 65,18 pada 2014 (BPS) atau dalam kondisi baik; dan tingkat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah ditunjukkan oleh raihan opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” dari BPK RI selama empat kali, dengan capaian tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Kemampuan ekonomi daerah ditunjukkan dengan indikator daya beli, laju pertumbuhan ekonomi, laju pertumbuhan ekspor, dan inflasi. Capaian pada 2016 indeks pengeluaran perkapita sebesar 69.51 poin; laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5.67 %; laju pertumbuhan ekspor sebesar 3,34 %; dan Inflasi sebesar 2.75 %. Pada urusan bidang penanaman modal dilakukan melalui: (1) menarik modal luar negeri, swasta dan modal publik, melalui komunikasi dengan investor dan lembaga keuangan, (2) mendorong penciptaan tenaga kerja terampil, menciptakan lingkungan yang kondusif dan menyediakan pasar kerja melalui program 2 (dua) juta penyediaan lapangan kerja. Capaian realisasi investasi pada 2016 nilai penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp 72,87 triliun; nilai penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp 30,36 triliun; nilai investasi PMA-PMDN sebesar Rp 103,23 triliun; Nilai Investasi berdasarkan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atas dasar harga berlaku sebesar Rp 412,30 triliun; dan laju Pertumbuhan Investasi (PMTB) atas dasar harga berlaku sebesar 4,02%.

Peningkatan capaian indikator ini dilaksanakan melalui pengendalian pelaksanaan penanaman modal PMA/PMDN melalui pembinaan dan pemantauan PMA/PMDN di 27 kabupaten/kota, penyelenggaraan promosi dan kerjasama investasi guna tersampainya informasi potensi investasi Jawa Barat kepada 500 calon investor di dalam maupun luar negeri, *opinion makers* dan *stakeholders* lainnya untuk meningkatkan minat investasi di Jawa Barat.

Pada bidang pariwisata, telah dilakukan berbagai upaya untuk menarik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara di antaranya penetapan geopark Ciletuh sebagai geopark nasional, serta penguatan infrastruktur dan manajemen destinasi wisata Jawa Barat lainnya. Upaya tersebut telah meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dari 1.962.639 orang pada Tahun 2015 menjadi 2.027.629 orang pada Tahun 2016; kunjungan wisatawan Nusantara meningkat dari 33.617.999 orang pada Tahun 2015 menjadi 38.286.230 orang pada Tahun 2016.

Penataan Ruang, pada Tahun 2016 difokuskan pada: (1) Pelaksanaan peninjauan kembali RTRW Provinsi Jawa Barat 2009-2029; (2) Penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Provinsi (KSP); (3) Fasilitasi pembahasan rekomendasi Gubernur tentang substansi Raperda RTRW kabupaten/kota sebanyak 27 RTRW; dan (4) Fasilitasi pembahasan rekomendasi Gubernur tentang substansi Raperda Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) sebanyak 4 (empat) kabupaten/kota.

Perumahan, telah dilaksanakan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni perkotaan dengan perbaikan fisik rumah tidak layak huni di 8 (delapan) kota, yaitu Kota Bandung, Kota Cimahi, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Cirebon, Kota Banjar dan Kota Depok sebanyak 2.989 Unit.

Perhubungan, pada Tahun 2016 keberhasilannya dapat ditunjukkan dengan meningkatnya tingkat ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan provinsi sebesar 19,06%, terdiri atas: (1) Tingkat ketersediaan prasarana transportasi udara penyelesaian pembangunan BIJB Kertajati dan Bandara Nusawiru mencapai 13,51%; (2) Tingkat ketersediaan prasarana transportasi Angkutan Sungai, Darat dan Pelabuhan (ASDP) dan pelabuhan pengumpan regional Jawa Barat bagian selatan yang mencapai 58,98%; dan (3) Ketersediaan prasarana jalur kereta api di Jawa Barat yang mencapai 1.135 Km.

Untuk meningkatkan iklim berinvestasi diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Hal tersebut dapat ditunjukkan melalui kebijakan pelayanan perijinan terpadu satu pintu. Pada 2015 kondisi iklim berinvestasi ditandai dengan: skala kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintahan berada pada skala 3,00 atau berkategori baik; indeks kebahagiaan sebesar 68,28 poin; dan indeks keterbukaan informasi publik mencapai 72,99 poin.

Kondusifnya Iklim berinvestasi didukung oleh akuntabilitas penyelenggaraan administrasi dalam bidang keuangan, yang pada 2016 pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapatkan kembali opini “**Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**” dari BPK RI, sebagai capaian tertinggi dalam

akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah, yang berdampak terhadap kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Jawa Barat.

Aspek Pemuda dan Olahraga, pada Tahun 2016 dilaksanakan melalui: pembinaan mental spiritual dan ideologi bagi generasi muda sebanyak 200 orang; dan pelatihan kemampuan dan keterampilan pemuda di bidang kewirausahaan sebanyak 200 orang.

Dalam rangka meningkatkan prestasi, peran pemuda dan olahraga telah dibangun sarana dan prasarana keolahragaan, seni dan budaya diberbagai wilayah di Jawa Barat. Untuk mendukung pelaksanaan Pekan Olah Raga Nasional (PON) ke XIX (sembilan belas) dan PEPARNAS ke XV (lima belas) 2016, telah dilaksanakan pembangunan venue di 12 Kabupaten/Kota, dan persiapan penyelenggaraannya. Persiapan tersebut ditujukan untuk mendukung sukses pelaksanaan PON 2016 yang mengusung 4 (empat) sukses, yaitu sukses penyelenggaraan, sukses ekonomi, sukses prestasi, dan sukses administrasi.

Aspek kebudayaan, dalam rangka meningkatkan pelestarian budaya Jawa Barat telah dilaksanakan: pelestarian permuseuman dan kepurbakalaan; pelestarian bahasa dan sastra; kesejarahan dan nilai tradisi; promosi museum; pengemasan dan relokasi koleksi; pemetaan cagar budaya; dan pemeliharaan situs cagar budaya. Dari berbagai kegiatan tersebut, pelestarian kesejarahan dan nilai tradisi Jawa Barat telah diusulkan ke badan internasional untuk mendapatkan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai kekayaan warisan Jawa Barat.

Pengelolaan bahasa, sastra, dan aksara daerah meraih penghargaan Anugerah Kawistara 2016 untuk kategori Instansi yang peduli terhadap kebahasaan dan kesusastraan.

Aspek Pariwisata, dilaksanakan melalui berbagai kegiatan diantaranya: pengembangan Produk Wisata Jawa Barat untuk meningkatkan daya tarik wisata Jawa Barat sebagai destinasi wisata andalan; peningkatan sarana promosi pariwisata Jawa Barat; serta

promosi pariwisata terpadu Jawa Barat dalam dan luar negeri untuk mempromosikan pariwisata Jawa Barat melalui *event*. Selain itu telah dilakukan berbagai upaya untuk menarik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara diantaranya penetapan Geopark Ciletuh sebagai Geopark Nasional, serta penguatan infrastuktur dan manajemen destinasi wisata Jawa Barat lainnya.

Capaian keberhasilan pembangunan urusan bidang pariwisata di Jawa Barat ditandai dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 2 juta orang lebih; jumlah kunjungan wisatawan Nusantara ke obyek wisata sebanyak 38 juta orang lebih pada 2015 meningkat dari 31,9 juta orang pada 2014.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD Tahun 2016 dan RKPD Tahun 2015

Pelaksanaan pembangunan Jawa Barat 2016 mengacu kepada Visi dan Misi RPJMD 2013 – 2018 yang dijabarkan dalam RKPD 2016. Keberhasilan pelaksanaan RKPD 2016 ditunjukkan oleh kinerja penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Barat yang terbagi atas indikator kinerja daerah, indikator kinerja program, dan indikator kinerja misi pada RPJMD 2008-2013.

2.2.1. Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2016 Terhadap APBD 2016

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap dokumen RKPD Tahun 2016, terdapat 101 program berupa Belanja Langsung (BL) yang harus dilaksanakan pada Tahun 2016, yang kemudian dijabarkan menjadi 2489 kegiatan. Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2016 yang dilaksanakan adalah 2489 kegiatan sebesar 100%. Sementara program yang dilaksanakan sebanyak 101 program, atau 100%. Kondisi ini menunjukkan tingginya konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Jawa Barat.

Evaluasi terhadap dokumen RKPD Tahun 2016 dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) parameter evaluasi, yaitu judul kegiatan, dan anggaran kegiatan. Berdasarkan analisis terhadap APBD, ditemukan

sebanyak 95% kegiatan APBD yang sesuai judul kegiatannya dengan RKPD dan sebanyak 95% kegiatan APBD lebih tinggi dari target anggaran RKPD. Data terperinci dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Capaian Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD Tahun 2016 Provinsi Jawa Barat

No	Urusan	Capaian program	Keterangan
1	Pendidikan		
1	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar	Jumlah anggaran sebesar Rp. 18.796.578.350, jumlah kegiatan sebanyak 10, dengan realisasi keuangan Rp.19.914.992.500 (105,95%)	Jumlah anggaran untuk urusan pendidikan sebesar Rp. 428.482.970.278 dan realisasi sebesar Rp. 389.049.776.614(96%) dari jumlah belanja langsung. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 6 program dan 42 kegiatan, dan terdapat satu program yang tidak terealisasi yaitu program Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Adapun OPD yang menangani urusan pendidikan, yaitu Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Biro Pelayanan Sosial Dasar. Realisasi anggaran sebesar 98,00%. Kinerja anggaran program terendah mencapai 71.58% untuk program pendidikan menengah dan tinggi dan kinerja tertinggi adalah program wajib belajar pendidikan dasar ,mencapai 105.95 %.
2	Program Pendidikan Menengah dan Tinggi	Jumlah anggaran sebesar Rp. 103.321.451.000, jumlah kegiatan sebanyak 24, dengan realisasi keuangan Rp. 73.956.159.184 (71,58%).	
3	Program Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal	Jumlah anggaran sebesar Rp. 6.227.627.750, jumlah kegiatan sebanyak 5, dengan realisasi keuangan Rp.5.446.630.669 (87,46%).	
4	Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	Jumlah anggaran sebesar Rp. 61.117.774.789, jumlah kegiatan sebanyak 8, dengan realisasi keuangan Rp.75.644.708.250 (123,77%).	
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan.	Tahun 2016 Tidak ada aktivitas	
6	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Jumlah anggaran sebesar Rp. 47.556.106.500, jumlah kegiatan sebanyak 17, dengan realisasi keuangan	

No	Urusan	Capaian program	Keterangan
		Rp.39.124.795.408 (82,27%).	
2	Kesehatan		
7	Program Promosi Kesehatan	Jumlah anggaran sebesar Rp. 6.221.175.675, jumlah kegiatan sebanyak 6, dengan realisasi keuangan Rp. 5.766.253.969 (91%).	Jumlah anggaran untuk urusan Kesehatan sebesar Rp. 814.650.686.201 dan realisasi sebesar Rp. 593.413.769.617(82%) dari jumlah belanja langsung. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 6 program dan 42 kegiatan. Adapun OPD yang menangani urusan kesehatan, yaitu Dinas Biro Pelayanan Sosial Dasar, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Umum Daerah Al-ihsan.Kinerja anggaran program terendah mencapai 43,70% untuk program Sumber Daya Kesehatan dan kinerja tertinggi adalah program Promosi Kesehatan, mencapai 92,69%.
8	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Jumlah anggaran sebesar Rp. , jumlah kegiatan sebanyak 5, dengan realisasi keuangan Rp. 5.766.253.969 (91%).	
9	Program Pelayanan Kesehatan	Jumlah anggaran sebesar Rp. 6.221.175.675, jumlah kegiatan sebanyak 23, dengan realisasi keuangan Rp. 391.455.387.252 (73,64%)	
10	Program Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah anggaran sebesar Rp. 4.751.096.750, jumlah kegiatan sebanyak 8, dengan realisasi keuangan Rp. 3.481.718.399 (73,28%)	
11	Program Sumber Daya Kesehatan	Jumlah anggaran sebesar Rp. 165.133.791.090, jumlah kegiatan sebanyak 12, dengan realisasi keuangan Rp. 137.882.814.419 (83,5%).	
12	Program Manajemen Kesehatan.	Jumlah anggaran sebesar Rp. 15.595.467.368, jumlah kegiatan sebanyak 18, dengan realisasi keuangan Rp. 10.317.332.443 (66,16%).	
3	Lingkungan Hidup		
13	Program Pengendalian Pencemaran dan	Jumlah anggaran sebesar Rp. 46.048.790.000, jumlah kegiatan	Jumlah anggaran untuk urusan Lingkungan Hidup sebesar Rp. 73.564.079.000 dan realisasi sebesar Rp. 62.675.615.043(93%) dari jumlah

No	Urusan	Capaian program	Keterangan
	Kerusakan Lingkungan Hidup	sebanyak 30, dengan realisasi keuangan Rp. 37.690.964.458 (81,85%).	belanja langsung. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 4 program dan 113 kegiatan. Adapun OPD yang menangani urusan Lingkungan Hidup, yaitu Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, Biro Pelayanan Sosial Dasar, Dinas Peternakan. Realisasi anggaran sebesar 92%. Kinerja anggaran program terendah mencapai 81.85% untuk Program Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan kinerja tertinggi adalah program Pengelolaan Kawasan Lindung, mencapai 97,06%.
14	Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah anggaran sebesar Rp. 1.516.590.000, jumlah kegiatan sebanyak 7, dengan realisasi keuangan Rp. 1.399.249.550 (92,26%).	
15	Program Pengelolaan Kawasan Lindung	Jumlah anggaran sebesar Rp. 4.286.480.000, jumlah kegiatan sebanyak 9, dengan realisasi keuangan Rp. 4.183.775.102 (97,6%)	
16	Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah anggaran sebesar Rp. 21.712.219.000, jumlah kegiatan sebanyak 13, dengan realisasi keuangan Rp. 19.401.625.933 (89,36%)	
4	Pekerjaan Umum		
17	Program Pengelolaan Ekosistem Pesisir Dan Laut	Jumlah anggaran sebesar Rp. 50.000.000, jumlah kegiatan sebanyak 1, dengan realisasi keuangan Rp. 46.299.000 (92,6)	Jumlah anggaran untuk urusan Pekerjaan Umum sebesar Rp. 1.389.774.689.792 dan realisasi sebesar Rp. 1.176.638.176.179(98%) dari jumlah belanja langsung. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 10 program dan 116 kegiatan. Adapun OPD yang menangani urusan Pekerjaan Umum, yaitu Dinas Bina Marga, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Dinas Permukiman dan Perumahan. Realisasi anggaran sebesar 98%. Kinerja anggaran program terendah mencapai 38,23% untuk Program Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman dan kinerja tertinggi adalah program Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan, mencapai 97,07%.
18	Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan	Jumlah anggaran sebesar Rp. 663.981.744.750, jumlah kegiatan sebanyak 13, dengan realisasi keuangan Rp. 640.795.872.794 (96,51%)	
18	Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Jumlah anggaran sebesar Rp. 250.093.582.542, jumlah kegiatan sebanyak 13, dengan realisasi keuangan Rp. 240.879.937.421 (96,32%)	
19	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Jumlah anggaran sebesar Rp. 4.997.505.000, jumlah kegiatan sebanyak 13, dengan realisasi keuangan Rp.	

No	Urusan	Capaian program	Keterangan
		4.882.531.480 (97,7%)	
21	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Jumlah anggaran sebesar Rp. 1.247.369.000, jumlah kegiatan sebanyak 5, dengan realisasi keuangan Rp. 1.195.197.115 (95,82%)	
22	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Jumlah anggaran sebesar Rp. 176.789.038.550, jumlah kegiatan sebanyak 19, dengan realisasi keuangan Rp. 132.085.209.311 (74,71%)	
23	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya	Jumlah anggaran sebesar Rp. 92.053.962.500, jumlah kegiatan sebanyak 34, dengan realisasi keuangan Rp. 75.628.563.843 (82,16%)	
24	Program Pengendalian Banjir dan Kekeringan serta Pengamanan Pantai	Jumlah anggaran sebesar Rp. 2.735.000.000, jumlah kegiatan sebanyak 3, dengan realisasi keuangan Rp. 2.610.814.743 (95,46%)	
25	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Jumlah anggaran sebesar Rp. 190.906.836.000, jumlah kegiatan sebanyak 23, dengan realisasi keuangan Rp. 72.977.710.725 (38,23%)	
26	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Jumlah anggaran sebesar Rp. 6.919.651.450, jumlah kegiatan sebanyak 5, dengan realisasi keuangan Rp. 5.536.040.360 (80%)	
5	Penataan Ruang		

No	Urusan	Capaian program	Keterangan
27	Program Penataan Ruang	Jumlah anggaran sebesar Rp. 10.132.735.000, jumlah kegiatan sebanyak 13, dengan realisasi keuangan Rp. 6.782.321.707 (66,93%)	Jumlah anggaran untuk urusan Penataan Ruang sebesar Rp. 10.132.735.000 dan realisasi sebesar Rp. 6.782.321.707 (66,93%) dari jumlah belanja langsung. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 1 program dan 13 kegiatan. Adapun OPD yang menangani urusan Penataan Ruang, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Permukiman Dan Perumahan.
6	Perencanaan Pembangunan		
28	Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah anggaran sebesar Rp. 13.020.398.000, jumlah kegiatan sebanyak 10, dengan realisasi keuangan Rp. 11.098.576.395 (85,24%)	Jumlah anggaran untuk urusan Perencanaan Pembangunan sebesar Rp. 106.845.773.412 dan realisasi sebesar Rp. 91.896.924.467(94%) dari jumlah belanja langsung. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 3 program dan 234 kegiatan. Adapun OPD yang menangani urusan Perencanaan Pembangunan, yaitu Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah Iii, Badan Penelitian, Pengembangan Dan Penerapan Iptek, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Biro Otonomi Daerah Dan Kerjasama. Kinerja anggaran program terendah mencapai 84,63% untuk Program Penelitian, Studi Dan Survey dan kinerja tertinggi adalah Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, mencapai 86,43%.
29	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Jumlah anggaran sebesar Rp. 77.298.358.412, jumlah kegiatan sebanyak 211, dengan realisasi keuangan Rp. 66.811.413.636 (86,43%)	
30	Program Penelitian, Studi, dan Survey	Jumlah anggaran sebesar Rp. 16.527.017.000, jumlah kegiatan sebanyak 13, dengan realisasi keuangan Rp. 13.986.934.436 (84,63%)	
7	Perumahan		
31	Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.	Jumlah anggaran sebesar Rp. 90.947.761.000, jumlah kegiatan sebanyak 13, dengan realisasi keuangan Rp. 42.389.507.945 (46,61%)	Jumlah anggaran untuk urusan Perumahan sebesar RP. 90.947.761,00 dan realisasi sebesar Rp.42.389.507.945,00(46,61%) dari jumlah belanja langsung. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 1 program dan 13 kegiatan. Adapun OPD yang menangani urusan Perumahan yaitu Dinas Permukiman Dan Perumahan
8	Kepemudaan dan Olahraga		
32	Program Peningkatan dan Pembinaan Peran Serta Pemuda	Jumlah anggaran sebesar Rp. 9.632.256.000, jumlah kegiatan sebanyak 8, dengan realisasi keuangan Rp.9.248.154.600	Jumlah anggaran untuk urusan Kepemudaan dan Olahraga sebesar RP. 588.563.944.926,00 dan realisasi sebesar Rp.515.987.527.688,00(87,67%) dari jumlah belanja langsung. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 2

No	Urusan	Capaian program	Keterangan
		(96,01%)	program dan 29 kegiatan. Adapun OPD yang menangani urusan Kepemudaan dan Olahraga , yaitu Dinas Olah Raga Dan Pemuda, Biro Pengembangan Sosial, Dinas Perbukitan Dan Perumahan, Sekretariat Dp Korpri Kinerja anggaran program terendah mencapai 96,01% untuk Program Peningkatan dan Pembinaan Peran Serta Pemuda dan kinerja tertinggi adalah Program Pembinaan, Pemasarakatan, dan Pengembangan Olah Raga,mencapai 105,95%.
33	Program Pembinaan, Masyarakatan, dan Pengembangan Olah Raga.	Jumlah anggaran sebesar Rp.578.931.688.926, jumlah kegiatan sebanyak 21, dengan realisasi keuangan Rp. 506.739.373.088 (87,53%)	
9	Penanaman Modal		
34	Program Peningkatan Iklim, Promosi, dan Kerjasama Investasi	Jumlah anggaran sebesar Rp. 6.590.647.000, jumlah kegiatan sebanyak 8, dengan realisasi keuangan Rp. 6.268.564.003 (95,11%)	Jumlah anggaran untuk urusan Penanaman Modal sebesar RP. 9.858.147.000,00 dan realisasi sebesar Rp.9.161.309.213,00(92,93%) dari jumlah belanja langsung. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 2 program dan 13 kegiatan. Adapun OPD yang menangani urusan Penanaman Modal , yaitu Badan Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu, Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral,Biro Investasi Dan Bumd. Kinerja anggaran program terendah mencapai 88,53% untuk Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD dan Lembaga Keuangan Non-Perbankan dan kinerja tertinggi adalah Program Peningkatan Iklim, Promosi, dan Kerjasama Investasi,mencapai 95,11%.
35	Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD dan Lembaga Keuangan Non-Perbankan	Jumlah anggaran sebesar Rp. 3.267.500.000, jumlah kegiatan sebanyak 5, dengan realisasi keuangan Rp. 2.892.745.210 (88,53%)	
10	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah		
36	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Jumlah anggaran sebesar Rp. 32.663.634.000, jumlah kegiatan sebanyak 21, dengan realisasi keuangan Rp. 30.123.659.375 (92,22%)	Jumlah anggaran untuk urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah sebesar RP. 38.316.259.000,00 dan realisasi sebesar Rp.35.704.652.575,00(93,18%) dari jumlah belanja langsung. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 2 program dan 26 kegiatan. Adapun OPD yang menangani urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah , yaitu Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kinerja anggaran program terendah mencapai 92,22% untuk Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan kinerja tertinggi adalah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,mencapai
37	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Jumlah anggaran sebesar Rp.5.652.625.000, jumlah kegiatan sebanyak 5, dengan realisasi keuangan Rp. 5.580.993.200 (98,73%)	

No	Urusan	Capaian program	Keterangan
			105,951.
11	Kependudukan dan Catatan Sipil		
38	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Jumlah anggaran sebesar Rp. 2.016.843.750, jumlah kegiatan sebanyak 4, dengan realisasi keuangan Rp. 1.726.242.017 (85,59%)	Jumlah anggaran untuk urusan Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar RP. 2.016.843.750,00 dan realisasi sebesar Rp.1.726.242.017,00(85,59%) dari jumlah belanja langsung. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 1 program dan 4 kegiatan. Adapun OPD yang menangani urusan Kependudukan dan Catatan Sipil , yaitu Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan KB, Biro Pemerintahan Umum.
12	Ketenagakerjaan		
39	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah anggaran sebesar Rp. 15.349.272.500, jumlah kegiatan sebanyak 16, dengan realisasi keuangan Rp. 14.787.225.100 (96,34%)	Jumlah anggaran untuk urusan Ketenagakerjaan RP. 27.027.366.500,00 dan realisasi sebesar Rp.25.596.407.950,00(94,71%) dari jumlah belanja langsung. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 3 program dan 50 kegiatan. Adapun OPD yang menangani urusan Ketenagakerjaan , yaitu Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi,Biro Pengembangan Sosial, Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral. Kinerja anggaran program terendah mencapai 90,04% untuk Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan kinerja tertinggi adalah Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan,mencapai 98,38%.
40	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Jumlah anggaran sebesar Rp. 3.527.295.000, jumlah kegiatan sebanyak 15, dengan realisasi keuangan Rp. 3.469.997.800 (98,38%)	
41	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah anggaran sebesar Rp. 8.150.799.000, jumlah kegiatan sebanyak 19, dengan realisasi keuangan Rp. 7.339.185.050 (90,04%)	
13	Ketahanan Pangan		
42	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Jumlah anggaran sebesar Rp. 16.781.332.100, jumlah kegiatan sebanyak 12, dengan realisasi keuangan Rp. 16.759.734.503 (99,87%)	Jumlah anggaran untuk urusan Ketahanan Pangan sebesar RP. 16.781.332.100,00 dan realisasi sebesar Rp.16.759.734.503,00(99,87%) dari jumlah belanja langsung. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 1 program dan 12 kegiatan. Adapun OPD yang menangani urusan Ketahanan Pangan , yaitu Badan Ketahanan Pangan Daerah, Dinas Perikanan Dan Kelautan.

No	Urusan	Capaian program	Keterangan
14	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
43	Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Jumlah anggaran sebesar Rp. 2.994.500.000, jumlah kegiatan sebanyak 4, dengan realisasi keuangan Rp. 3.048.811.615 (101,81)	Jumlah anggaran untuk urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp28.720.160.000 dan realisasi sebesar Rp. 25.820.758.685 (89,90 %) dari jumlah belanja langsung Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 3 program dan 24 kegiatan. Adapun OPD yang menangani urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jawa Barat. Kinerja anggaran program terendah mencapai 84,57 % untuk Program Ketahanan Keluarga Dan Kesejahteraan Keluarga dan kinerja tertinggi adalah Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan, mencapai 101,81 %.
44	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah anggaran sebesar Rp. 15.471.660.000, jumlah kegiatan sebanyak 18, dengan realisasi keuangan Rp. 14.100.470.672 (91,14)	
45	Program Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga.	Jumlah anggaran sebesar Rp. 10.254.000.000, jumlah kegiatan sebanyak 2, dengan realisasi keuangan Rp. 8.671.476.398 (84,57)	
15	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera		
46	Program Pelayanan Keluarga Berencana	Jumlah anggaran sebesar Rp. 1.634.000.000, jumlah kegiatan sebanyak 1, dengan realisasi keuangan Rp. 1.349.419.270 (82,58)	Jumlah anggaran untuk urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebesar Rp. 2.534.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 2.189.688.402 (86,41 %) dari jumlah belanja langsung. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 2 program dan 2 kegiatan. Adapun OPD yang menangani urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan, yaitu Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Provinsi Jawa Barat. Kinerja anggaran program terendah mencapai 82,58 % untuk Program Pelayanan Keluarga Berencana dan kinerja tertinggi adalah Program Pendewasaan Usia Perkawinan (pup), mencapai 93,36 %.
47	Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP).	Jumlah anggaran sebesar Rp. 900.000.000, jumlah kegiatan sebanyak 1, dengan realisasi keuangan Rp. 840.269.132 (93,36)	
16	Perhubungan		
48	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah anggaran sebesar Rp. 49.898.816.000, jumlah kegiatan sebanyak 33, dengan realisasi keuangan Rp. 27.877.928.292 (55,87)	Jumlah anggaran untuk urusan Perhubungan sebesar Rp. 70.754.518.916 dan realisasi sebesar Rp. 43.934.024.971 (62,09 %) dari jumlah belanja langsung. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 5 program dan 46 kegiatan. Adapun

No	Urusan	Capaian program	Keterangan
49	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ);	Jumlah anggaran sebesar Rp. 13.209.342.916, jumlah kegiatan sebanyak 6, dengan realisasi keuangan Rp. 10.188.536.406 (77,13)	OPD yang menangani urusan Perhubungan, yaitu Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Kinerja anggaran program terendah mencapai 43,28 % untuk Program Program Peningkatan Kelayakan Kendaraan Bermotor dan kinerja tertinggi adalah Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas, mencapai 86,08 %.
50	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jumlah anggaran sebesar Rp. 3.244.325.000, jumlah kegiatan sebanyak 6, dengan realisasi keuangan Rp. 2.263.705.316 (69,77)	
51	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Jumlah anggaran sebesar Rp. 3.969.200.000, jumlah kegiatan sebanyak 2, dengan realisasi keuangan Rp. 3.416.517.638 (86,08)	
52	Program Peningkatan Kelayakan Kendaraan Bermotor	Jumlah anggaran sebesar Rp. 432.835.000, jumlah kegiatan sebanyak 1, dengan realisasi keuangan Rp. 187.337.319 (43,28)	
17	Komunikasi dan Informatika		
53	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah anggaran sebesar Rp. 65.655.216.696, jumlah kegiatan sebanyak 56, dengan realisasi keuangan Rp. 59.703.796.136 (90,94)	Jumlah anggaran untuk urusan Komunikasi dan Informatika sebesar Rp. 65.655.216.696 dan realisasi sebesar Rp. 59.703.796.136 (90.94%) dari jumlah belanja langsung. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 1 program dan 56 kegiatan. Adapun OPD yang menangani urusan Perhubungan, Badan Ketahanan Pangan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pendidikan Dan Pelatihan Daerah, Biro Humas Protokol Dan Umum, Dinas Bina Marga, Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral, Dinas Komunikasi Dan Informatika, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Sosial, Kantor Perwakilan Pemerintahan, Sekretariat Dp Korpri, Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Barat.
18	Pertanahan		

No	Urusan	Capaian program	Keterangan
54	Program Pengadaan, Penataan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan	Jumlah anggaran sebesar Rp. 739.720.200.000, jumlah kegiatan sebanyak 5, dengan realisasi keuangan Rp. 197.854.203.580 (26,75)	Jumlah anggaran untuk urusan Perhubungan sebesar Rp. 739.720.200.000 dan realisasi sebesar Rp. 197.854.203.580 (26,75 %) dari jumlah belanja langsung. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 1 program dan 5 kegiatan. Adapun OPD yang menangani urusan Pertanahan, yaitu Biro Pemerintahan Umum, Biro Pengelolaan Barang Daerah, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri		
55	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Jumlah anggaran sebesar Rp. 5.250.850.000, jumlah kegiatan sebanyak 10, dengan realisasi keuangan Rp. 4.896.548.126 (93,25)	Jumlah anggaran untuk urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri sebesar Rp. 10.662.942.750 dan realisasi sebesar Rp. 9.888.934.476 (92,74 %) dari jumlah belanja langsung. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 2 program dan 21 kegiatan. Adapun OPD yang menangani urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, yaitu Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, Biro Pemerintahan Umum Provinsi Jawa Barat, Biro Pemerintahan Umum, Satuan Polisi Pamong Praja. Kinerja anggaran program terendah mencapai 92,25 % untuk Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan kinerja tertinggi adalah Program Pendidikan Politik Masyarakat, mencapai 93,25 %.
56	Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah anggaran sebesar Rp. 5.412.092.750, jumlah kegiatan sebanyak 11, dengan realisasi keuangan Rp. 4.992.386.350 (92,25)	
20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian		
57	Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah	Jumlah anggaran sebesar Rp. 56.438.405.850, jumlah kegiatan sebanyak 79, dengan realisasi keuangan Rp. 46.386.895.831 (82,19)	Jumlah anggaran untuk urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian sebesar Rp. 1.845.557.560.373 dan realisasi sebesar Rp. 1.536.295.409.262 (83,24 %) dari jumlah belanja langsung. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 11 program dan 1.071 kegiatan. Adapun OPD yang menangani urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian, yaitu Badan Kepegawaian Daerah, Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah I, Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah III, Badan Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu, Badan Pendidikan Dan Pelatihan Daerah, Badan Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah, Biro Investasi
58	Program Pengembangan Kompetensi Aparatur	Jumlah anggaran sebesar Rp. 74.312.962.750, jumlah kegiatan sebanyak 66, dengan realisasi keuangan Rp. 54.786.844.948 (73,72)	
59	Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur	Jumlah anggaran sebesar Rp. 71.308.380.727, jumlah kegiatan sebanyak 130, dengan realisasi keuangan Rp. 54.716.859.561 (76,73)	
60	Program	Jumlah anggaran	

No	Urusan	Capaian program	Keterangan
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	sebesar Rp. 487.489.965.399, jumlah kegiatan sebanyak 209, dengan realisasi keuangan Rp. 382.553.991.629 (78,47)	Dan Bumd, Biro Organisasi, Biro Otonomi Daerah Dan Kerjasama, Biro Pemerintahan Umum, Biro Perekonomian, Dinas Pendapatan Daerah, Inspektorat, Kantor Perwakilan Pemerintahan, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat Dp Korpri Provinsi Jawa Barat. Kinerja anggaran program terendah mencapai 73,72 % Program Pengembangan Kompetensi Aparatur dan kinerja tertinggi Program Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah., mencapai 118.52 %.
61	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah anggaran sebesar Rp. 925.518.746.829, jumlah kegiatan sebanyak 220, dengan realisasi keuangan Rp. 739.514.694.841 (79.9%)	
62	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah anggaran sebesar Rp. 298.192.035.509, jumlah kegiatan sebanyak 185, dengan realisasi keuangan Rp. 277.621.581.517 (93.1%)	
63	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Kesadaran Hukum dan HAM	Jumlah anggaran sebesar Rp. 22.959.920.300, jumlah kegiatan sebanyak 22, dengan realisasi keuangan Rp. 21.078.894.023 (91.81%)	
64	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah anggaran sebesar Rp. 55.791.234.000, jumlah kegiatan sebanyak 6, dengan realisasi keuangan Rp. 66.123.188.530 (118.52%)	
65	Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah	Jumlah anggaran sebesar Rp. 26.040.939.936, jumlah kegiatan sebanyak 6, dengan realisasi keuangan Rp. 20.588.677.662 (79.06 %)	
66	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah anggaran sebesar Rp. 9.137.493.900, jumlah kegiatan sebanyak 76, dengan realisasi keuangan Rp. 8.439.692.289 (92.36)	
67	Program Pengendalian	Jumlah anggaran sebesar	

No	Urusan	Capaian program	Keterangan
	dan Pengawasan Pembangunan	Rp.20.427.224.500, jumlah kegiatan sebanyak 76, dengan realisasi keuangan Rp. 8.439.692.289 (92.36)	
21	Pemberdayaan Masyarakat Desa		
68	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Jumlah anggaran sebesar Rp.16.500.250.000, jumlah kegiatan sebanyak 11, dengan realisasi keuangan Rp. 16.726.823.100 (101.37).	Jumlah anggaran untuk urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp 28,995,067,500,- dan realisasi sebesar Rp. 27,166,822,519,- (94 %) dari jumlah belanja langsung. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 4 program dan 24 kegiatan. Adapun OPD yang menangani urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa, yaitu Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah III, Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa, Biro Pemerintahan Umum. Kinerja anggaran program terendah mencapai 82,3 % untuk Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan, dan untuk program tertinggi yaitu Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan Partisipasi Masyarakat sebesar 101 %.
69	Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa	Jumlah anggaran sebesar Rp.5.944.817.500, jumlah kegiatan sebanyak 11, dengan realisasi keuangan Rp. 5.022.858.841 (84.49).	
70	Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan	Jumlah anggaran sebesar Rp.3.800.000.000, jumlah kegiatan sebanyak 1, dengan realisasi keuangan Rp. 3.125.547.300 (82.25) .	
71	Program peningkatan dan pembinaan peran serta masyarakat dalam pembangunan	Jumlah anggaran sebesar Rp.2.750.000.000, jumlah kegiatan sebanyak 1, dengan realisasi keuangan Rp. 2.291.593.278 (83.33).	
22	Sosial		
72	Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah anggaran sebesar Rp.21.932.935.000, jumlah kegiatan sebanyak 19, dengan realisasi keuangan Rp. 20.303.456.555 (92.57).	Jumlah anggaran untuk urusan Sosial sebesar Rp 18,902,905,000,- dan realisasi sebesar Rp. 13,784,711,315,- (91 %) dari jumlah belanja langsung. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 5 program dan 62 kegiatan. Adapun OPD yang menangani urusan Sosial, yaitu Biro Pengembangan Sosial, Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kinerja anggaran program terendah mencapai 85,99 % untuk Program Perlindungan Sosial, dan untuk program tertinggi yaitu Program Penanggulangan Bencana Alam Dan Perlindungan Masyarakat sebesar 100,21 %.
73	Program Pemberdayaan Sosial	Jumlah anggaran sebesar Rp.2.750.000.000, jumlah kegiatan sebanyak 5, dengan realisasi keuangan Rp. 2.395.609.200 (87.11).	
74	Program Perlindungan Sosial	Jumlah anggaran sebesar Rp.27.832.025.000, jumlah kegiatan	

No	Urusan	Capaian program	Keterangan
		sebanyak 11, dengan realisasi keuangan Rp. 23.931.823.881 (85.99).	
75	Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah anggaran sebesar Rp.11.697.769.000, jumlah kegiatan sebanyak 16, dengan realisasi keuangan Rp. 11.722.223.288 (100.21).	
76	Program Pendayagunaan dan Pemberdayaan Potensi SumberKesejahteraan Sosial (PSKS).	Jumlah anggaran sebesar Rp.8.547.437.620, jumlah kegiatan sebanyak 11, dengan realisasi keuangan Rp. 7.856.281.486 (91.91).	
23	Kebudayaan		
77	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah anggaran sebesar Rp.18.902.905.000, jumlah kegiatan sebanyak 34, dengan realisasi keuangan Rp. 13.784.711.315 (72.92).	Jumlah anggaran untuk urusan Kebudayaan sebesar Rp 38,421,635,000,- dan realisasi sebesar Rp.32,545,532,815 ,- (85 %) dari jumlah belanja langsung. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 2 program dan 76 kegiatan. Adapun OPD yang menangani urusan Kebudayaan , yaitu
78	Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	Jumlah anggaran sebesar Rp.19.518.730.000, jumlah kegiatan sebanyak 42, dengan realisasi keuangan Rp. 18.760.821.500 (96.12).	Biro Pelayanan Sosial Dasar Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Dinas Pendidikan Dinas Permukiman Dan Perumahan. Kinerja anggaran program terendah mencapai 72,9% untuk Program Pengembangan Nilai Budaya, dan untuk program tertinggi yaitu Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya sebesar 96,1 %.
24	Statistik		
79	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Jumlah anggaran sebesar Rp.24.234.431.016, jumlah kegiatan sebanyak 42, dengan realisasi keuangan Rp. 17.980.237.674 (74.19).	Jumlah anggaran untuk urusan Statistik Rp 24,234,431,016,- dan realisasi sebesar Rp. 17,980,237,674,- (74 %) dari jumlah belanja langsung. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 1 program dan 30 kegiatan. Adapun OPD yang menangani urusan Statistik, yaitu Badan Kepegawaian Daerah, Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah II, Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah IV ,Badan Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu, Badan

No	Urusan	Capaian program	Keterangan
			Penelitian, Pengembangan Dan Penerapan Iptek, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Biro Keuangan, Biro Pengelolaan Barang Daerah, Dinas Kehutanan, Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Dinas Olah Raga Dan Pemuda, Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan, Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan
25	Kearsipan		
80	Program Pengembangan Kearsipan	Jumlah anggaran sebesar Rp.3.185.000.000, jumlah kegiatan sebanyak 6, dengan realisasi keuangan Rp. 3.460.276.134 (108.64).	Jumlah anggaran untuk urusan Kearsipan sebesar Rp 3,185,000,000,- dan realisasi sebesar Rp. 3,460,276,134,-(108.64 %) dari jumlah belanja langsung. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 1 program dan 6 kegiatan. Adapun OPD yang menangani urusan Kearsipan, yaitu Badan Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah
26	Perpustakaan		
81	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.	Jumlah anggaran sebesar Rp. 11.062.387.000, jumlah kegiatan sebanyak 12, dengan realisasi keuangan Rp. 13.818.940.753 (124,92%).	urusan Perpustakaan sebesar Rp. 11,062,387,000,- dan realisasi sebesar Rp. 13,818,940,753,-(125 %) dari jumlah belanja langsung. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 1 program dan 12 kegiatan. Adapun OPD yang menangani urusan Perpustakaan, yaitu Badan Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah, Biro Humas Protokol Dan Umum.
27	Perikanan dan Kelautan		
82	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah anggaran sebesar Rp. 26.316.708.500, jumlah kegiatan sebanyak 29, dengan realisasi keuangan Rp. 27.239.540.654 (103,51%)	Jumlah anggaran untuk urusan Perikanan dan Kelautan sebesar RP. 41.897.884.500,00 dan realisasi sebesar Rp.38.359.821.745,00(91,56%) dari jumlah belanja langsung. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 2 program dan 40 kegiatan. Adapun OPD yang menangani urusan Perikanan dan Kelautan , yaitu Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Jawa Barat. Kinerja anggaran program terendah mencapai 71,37% untuk Program Pengembangan Perikanan
83	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah anggaran sebesar Rp.15.581.176.000, jumlah kegiatan sebanyak 11, dengan	

No	Urusan	Capaian program	Keterangan
		realisasi keuangan Rp. 11.120.281.091 (71,37%)	Tangkap dan kinerja tertinggi adalah Program Pengembangan Budidaya Perikanan, mencapai 103,51%.
28	Pertanian		
84	Program Peningkatan Produksi Pertanian	Jumlah anggaran sebesar Rp. 63.987.332.662, jumlah kegiatan sebanyak 61, dengan realisasi keuangan Rp. 59.042.596.615 (92,27%)	Jumlah anggaran untuk urusan Pertanian sebesar RP. 140.043.821.732,00 dan realisasi sebesar Rp.136.380.315.703,00(97,38%) dari jumlah belanja langsung. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 4 program dan 113 kegiatan. Adapun OPD yang menangani urusan Pertanian , yaitu Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan, Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Dinas Perikanan dan Kelautan, Kehutanan dan Dinas Perkebunan,. Kinerja anggaran program terendah mencapai 92,27% untuk Program Peningkatan Produksi Pertanian dan kinerja tertinggi adalah Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian, mencapai 104,58%.
85	Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian	Jumlah anggaran sebesar Rp. 41.512.109.520, jumlah kegiatan sebanyak 28, dengan realisasi keuangan Rp. 43.411.638.521 (104,58%)	
86	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan	Jumlah anggaran sebesar Rp. 22.535.936.050, jumlah kegiatan sebanyak 10, dengan realisasi keuangan Rp. 22.202.878.237 (98,52%)	
87	Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan.	Jumlah anggaran sebesar Rp. 12.008.443.500, jumlah kegiatan sebanyak 14, dengan realisasi keuangan Rp. 11.723.202.330 (97,62%)	
29	Kehutanan		
88	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Jumlah anggaran sebesar Rp. 9.309.983.240, jumlah kegiatan sebanyak 19, dengan realisasi keuangan Rp. 8.814.000.508 (94,67%)	Jumlah anggaran untuk urusan Kehutan sebesar RP. 9.309.983.240,00 dan realisasi sebesar Rp.8.814.000.508,00(94,67%) dari jumlah belanja langsung. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 1 program dan 19 kegiatan. Adapun OPD yang menangani urusan Kehutanan , yaitu Dinas Kehutanan, Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan.
30	Perindustrian		
89	Program Pengembangan Industri Kecil dan	Jumlah anggaran sebesar Rp. 13.400.000.000, jumlah kegiatan	Jumlah anggaran untuk urusan Perindustrian sebesar RP. 16.647.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp.15.760.606.947,00(94,68%)

No	Urusan	Capaian program	Keterangan
	Menengah	sebanyak 20, dengan realisasi keuangan Rp. 12.882.339.801 (96,14%)	dari jumlah belanja langsung. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 2 program dan 42 kegiatan. Adapun OPD yang menangani urusan Perindustrian , yaitu Dinas Perindustrian. Kinerja anggaran program terendah mencapai 88,64% untuk Program Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri dan kinerja tertinggi adalah Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah ,mencapai 96,14%.
90	Program Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Jumlah anggaran sebesar Rp. 3.247.000.000, jumlah kegiatan sebanyak 22, dengan realisasi keuangan Rp. 2.878.267.146 (88,64%)	
31	Perdagangan		
91	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah anggaran sebesar Rp. 6.611.500.000, jumlah kegiatan sebanyak 10, dengan realisasi keuangan Rp. 5.911.279.222 (89,41%)	Jumlah anggaran untuk urusan Perdagangan sebesar RP. 17.170.850.000,00 dan realisasi sebesar Rp.16.110.634.859,00(93,83%) dari jumlah belanja langsung. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 3 program dan 31 kegiatan. Adapun OPD yang menangani urusan Perdagangan , yaitu Dinas Perindustrian. Kinerja anggaran program terendah mencapai 89,41% untuk Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri dan kinerja tertinggi adalah Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan ,mencapai 97,07%.
92	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Jumlah anggaran sebesar Rp. 2.790.350.000, jumlah kegiatan sebanyak 12, dengan realisasi keuangan Rp.2.658.222.740 (95,26%)	
93	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah anggaran sebesar Rp. 7.769.000.000, jumlah kegiatan sebanyak 9, dengan realisasi keuangan Rp. 7.541.132.897 (97,07%)	
32	Pariwisata		
94	Program Pengembangan Destinasi Wisata	Jumlah anggaran sebesar Rp. 9.340.000.000, jumlah kegiatan sebanyak 23, dengan realisasi keuangan Rp. 8.406.120.239(90%)	Jumlah anggaran untuk urusan Pariwisata sebesar RP. 20.262.260.000,00 dan realisasi sebesar Rp.17.643.348.518,00(87,07%) dari jumlah belanja langsung. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 2 program dan 42 kegiatan. Adapun OPD yang menangani urusan Pariwisata , yaitu Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan. Kinerja anggaran program terendah mencapai 84,57% untuk Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan kinerja tertinggi adalah Program Pengembangan Destinasi Wisata ,mencapai 90%.
95	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah anggaran sebesar Rp. 10.922.260.000, jumlah kegiatan sebanyak 19, dengan realisasi keuangan Rp.9.237.228.279 (84,57%)	

No	Urusan	Capaian program	Keterangan
33	Energi dan Sumber Daya Mineral		
96	Program Pembinaan, Pengembangan Sumber Daya Mineral, Geologi dan Air Tanah	Jumlah anggaran sebesar Rp. 8.089.163.625, jumlah kegiatan sebanyak 16, dengan realisasi keuangan Rp. 3.850.580.442 (47,6%)	Jumlah anggaran untuk urusan Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp.34.396.538.625 dan realisasi sebesar Rp. 27.013.483.634(78,54%) dari jumlah belanja langsung. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 3 (tiga) program dan 26 kegiatan.
97	Program Pembinaan, Pengembangan Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan Energi	Jumlah anggaran sebesar Rp. 25.357.375.000, jumlah kegiatan sebanyak 9, dengan realisasi keuangan Rp. 22.300.317.036 (87,94%).	Adapun OPD yang urusan Energi Sumber Daya Mineral adalah Dinas ESDM. Kinerja anggaran program terendah mencapai 47,6% untuk program Pembinaan dan Pengembangan SDM Geologi dan Air Tanah dan kinerja tertinggi adalah program Pembinaan, Pengembangan Panas Bumi dan Migas dimana mencapai 90,8%.
98	Program Pembinaan, Pengembangan Panas Bumi dan Migas	Jumlah anggaran sebesar Rp. 950.000.000, jumlah kegiatan sebanyak 1, dengan realisasi keuangan Rp. 862.586.156 (90,8%).	
34	Ketransmigrasian		
99	Program Pengembangan Transmigrasi	Jumlah anggaran sebesar Rp. 2.107.767.500, jumlah kegiatan sebanyak 6, dengan realisasi keuangan Rp. 1.992.863.253 (95,%).	Jumlah anggaran untuk urusan Ketransmigrasian sebesar Rp. 2.107.767.500 dan realisasi sebesar Rp. 1.992.863.253 (95,%). dari jumlah belanja langsung. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 1 program dan 6 kegiatan. Adapun OPD yang urusan Ketransmigrasian adalah Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
35	URUSAN KEAGAMAAN (PUSAT)		
100	Program Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan	Jumlah anggaran sebesar Rp. 9.656.111.000, jumlah kegiatan sebanyak 7, dengan realisasi keuangan Rp. 997.1090.134 (103,26%).	Jumlah anggaran untuk urusan Keagamaan sebesar Rp.31.101.190.000 dan realisasi sebesar Rp. 27.894.365.174(90%) dari jumlah belanja langsung. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 2 (dua) program dan 13 (tiga belas) kegiatan.
101	Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama	Jumlah anggaran sebesar Rp.21.445.079.000, jumlah kegiatan sebanyak 6, dengan realisasi keuangan Rp. 17.923.275.040	Adapun OPD yang urusan Keagamaan adalah Biro Pelayanan Sosial Dasar Kinerja anggaran program terendah mencapai 83,58% untuk program Peningkatan Pemahaman dan

No	Urusan	Capaian program	Keterangan
		(83,58%).	Pengamalan Agama dan kinerja tertinggi adalah program Pembinaan, Lembaga Sosial Keagamaan mencapai 103%.

2.2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2015

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap dokumen RKPD tahun 2015, terdapat 102 program berupa belanja langsung (BL) yang harus dilaksanakan dan dijabarkan menjadi 2.722 kegiatan. Kegiatan APBD tahun anggaran 2015 yang dilaksanakan sebanyak 2.512 kegiatan dari 2.722 kegiatan atau sebesar 92,29%. Sementara program yang dilaksanakan sebanyak 101 program atau 99,02%. Kondisi ini menunjukkan tingginya konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Jawa Barat. Kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKPD tahun 2015 telah dilaksanakan dalam dokumen APBD Tahun Anggaran 2015 dengan capaian kinerja keuangan program berkisar dari 48,85% - 98,66%, dan kinerja fisik program sebesar 48,85% - 100%. Data terperinci dapat dilihat pada Tabel 2.14.

Tabel 2.14
Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2015
Provinsi Jawa Barat

No.	Urusan	Capaian Program
Pendidikan		
	• Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar	Jumlah anggaran sebesar Rp. 21.621.397.015, jumlah kegiatan sebanyak 7, dengan realisasi keuangan maupun fisik sebesar 90,48%.
	• Program Pendidikan Menengah dan Tinggi	Jumlah anggaran sebesar Rp. 15.091.220.000, jumlah kegiatan sebanyak 11, dengan realisasi keuangan maupun fisik sebesar 85,29%.
	• Program Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal	Jumlah anggaran sebesar Rp. 8.958.690.500, jumlah kegiatan sebanyak 5, dengan realisasi keuangan maupun fisik sebesar 86,23%.
	• Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	Jumlah anggaran sebesar Rp. 75.890.693.000, jumlah kegiatan sebanyak 3, dengan realisasi keuangan maupun fisik sebesar 98,00%.
	• Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.	Jumlah anggaran sebesar Rp. 13.429.228.093, jumlah kegiatan sebanyak 8, dengan realisasi keuangan maupun fisik sebesar 94,08%.
	• Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Jumlah anggaran sebesar Rp. 20.654.268.650, jumlah kegiatan sebanyak 8, dengan realisasi keuangan maupun fisik sebesar 61,32%.
Kesehatan		
	• Program Promosi Kesehatan	Jumlah anggaran sebesar Rp. 1.936.500.000, jumlah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018

No.	Urusan	Capaian Program
		kegiatan sebanyak 3, dengan realisasi keuangan maupun fisik sebesar 90,19%.
	• Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Jumlah anggaran sebesar Rp. 3.545.773.750, jumlah kegiatan sebanyak 5, dengan realisasi keuangan maupun fisik sebesar 83,02%.
	• Program Pelayanan Kesehatan	Jumlah anggaran sebesar Rp. 553.473.332.972, jumlah kegiatan sebanyak 17, dengan realisasi keuangan maupun fisik sebesar 77,86%.
	• Program Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah anggaran sebesar Rp. 3.396.854.300, jumlah kegiatan sebanyak 7, dengan realisasi keuangan maupun fisik sebesar 86,21%.
	• Program Sumber Daya Kesehatan	Jumlah anggaran sebesar Rp. 128.045.756.628, jumlah kegiatan sebanyak 25, dengan realisasi keuangan sebesar 73,78%, fisik 86,62%.
	• Program Manajemen Kesehatan.	Jumlah anggaran sebesar Rp. 8.688.124.663, jumlah kegiatan sebanyak 16, dengan realisasi keuangan sebesar 80,58%, fisik 84,53%.
Lingkungan Hidup		
	• Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah anggaran sebesar Rp. 33.468.790.000, jumlah kegiatan sebanyak 30, dengan realisasi keuangan sebesar 91,29%, fisik 99,99%.
	• Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah anggaran sebesar Rp. 2.431.040.000,00, jumlah kegiatan sebanyak 8, dengan realisasi keuangan sebesar 90,04%, fisik 92,42%.
	• Program Pengelolaan Kawasan Lindung	Jumlah anggaran sebesar Rp. 3.715.420.000, jumlah kegiatan sebanyak 9, dengan realisasi keuangan sebesar 98,32%, fisik 98,94%.
	• Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah anggaran sebesar Rp. 18.823.365.000, jumlah kegiatan sebanyak 8, dengan realisasi keuangan maupun fisik sebesar 62,67%.
Pekerjaan Umum		
	• Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan	Jumlah anggaran sebesar Rp. 533.030.000.020, jumlah kegiatan sebanyak 14, dengan realisasi keuangan sebesar 98,44%, fisik 94,54%.
	• Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Jumlah anggaran sebesar Rp. 571.619.856.784, jumlah kegiatan sebanyak 15, dengan realisasi keuangan sebesar 95,38%, fisik 100,00%.
	• Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Jumlah anggaran sebesar Rp. 7.724.632.250, jumlah kegiatan sebanyak 1, dengan realisasi keuangan sebesar 63,00%, fisik 100,00%.
	• Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Jumlah anggaran sebesar Rp. 1.308.700.000, jumlah kegiatan sebanyak 4, dengan realisasi keuangan sebesar 85,46%, fisik 91,34%.
	• Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Jumlah anggaran sebesar Rp. 106.478.904.680, jumlah kegiatan sebanyak 12, dengan realisasi keuangan sebesar 81,38%, fisik 85,46%.
	• Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya	Jumlah anggaran sebesar Rp. 42.688.134.411, jumlah kegiatan sebanyak 31, dengan realisasi keuangan sebesar 88,10%, fisik 99,62%.
	• Program Pengendalian Banjir dan Kekeringan serta Pengamanan Pantai	Jumlah anggaran sebesar Rp. 6.886.828.000, jumlah kegiatan sebanyak 3, dengan realisasi keuangan sebesar 96,54%, fisik 100,00%.
	• Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Jumlah anggaran sebesar Rp. 114.593.696.600, jumlah kegiatan sebanyak 15, dengan realisasi keuangan sebesar 84,64%, fisik 98,29%.
	• Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Jumlah anggaran sebesar Rp. 4.855.688.625, jumlah kegiatan sebanyak 5, dengan realisasi keuangan sebesar 88,51%, fisik 96,90%.
Penataan Ruang		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018

No.	Urusan	Capaian Program
	<ul style="list-style-type: none"> Program Penataan Ruang 	Jumlah anggaran sebesar Rp. 4.676.555.500, jumlah kegiatan sebanyak 12, dengan realisasi keuangan sebesar 86,89%, fisik 91,91%.
Perencanaan Pembangunan		
	<ul style="list-style-type: none"> Program Kerjasama Pembangunan 	Jumlah anggaran sebesar Rp. 5.338.689.430, jumlah kegiatan sebanyak 14, dengan realisasi keuangan sebesar 83,94%, fisik 83,94%.
	<ul style="list-style-type: none"> Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah 	Jumlah anggaran sebesar Rp. 63.655.152.249, jumlah kegiatan sebanyak 186, dengan realisasi keuangan sebesar 86,92%, fisik 88,73%.
	<ul style="list-style-type: none"> Program Penelitian, Studi, dan Survey 	Jumlah anggaran sebesar Rp. 6.613.600.000, jumlah kegiatan sebanyak 11, dengan realisasi keuangan sebesar 70,22%, fisik 70,22%.
Perumahan		
	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman. 	Jumlah anggaran sebesar Rp. 38.066.626.600, jumlah kegiatan sebanyak 13, dengan realisasi keuangan sebesar 91,96%, fisik 96,93%.
Keperguruan dan Olahraga		
	<ul style="list-style-type: none"> Program Peningkatan dan Pembinaan Peran Serta Pemuda 	Jumlah anggaran sebesar Rp. 12.414.447.838, jumlah kegiatan sebanyak 9, dengan realisasi keuangan sebesar 92,27%, fisik 92,27%.
	<ul style="list-style-type: none"> Program Pembinaan, Pemasarakatan, dan Pengembangan Olah Raga. 	Jumlah anggaran sebesar Rp. 457.749.452.941, jumlah kegiatan sebanyak 24, dengan realisasi keuangan sebesar 65,72%, fisik 66,17%.
Penanaman Modal		
	<ul style="list-style-type: none"> Program Peningkatan Iklim, Promosi, dan Kerjasama Investasi 	Jumlah anggaran sebesar Rp. 8.674.604.925, jumlah kegiatan sebanyak 9, dengan realisasi keuangan sebesar 93,05%, fisik 92,89%.
	<ul style="list-style-type: none"> Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD dan Lembaga Keuangan Non-Perbankan 	Jumlah anggaran sebesar Rp. 1.358.591.000, jumlah kegiatan sebanyak 4, dengan realisasi keuangan sebesar 51,49%, fisik 51,49%.
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah		
	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 	Jumlah anggaran sebesar Rp. 16.654.326.500, jumlah kegiatan sebanyak 16, dengan realisasi keuangan sebesar 91,80%, fisik 92,84%.
	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 	Jumlah anggaran sebesar Rp. 6.066.712.000, jumlah kegiatan sebanyak 97,47, dengan realisasi keuangan sebesar 63,00%, fisik 100,00%.
Kependudukan dan Catatan Sipil		
	<ul style="list-style-type: none"> Program Penataan Administrasi Kependudukan 	Jumlah anggaran sebesar Rp. 1.398.416.200, jumlah kegiatan sebanyak 4, dengan realisasi keuangan sebesar 87,69%, fisik 87,69%.
Ketenagakerjaan		
	<ul style="list-style-type: none"> Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 	Jumlah anggaran sebesar Rp. 22.113.139.373, jumlah kegiatan sebanyak 18, dengan realisasi keuangan sebesar 96,23%, fisik 98,86%.
	<ul style="list-style-type: none"> Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 	Jumlah anggaran sebesar Rp. 5.161.763.000, jumlah kegiatan sebanyak 18, dengan realisasi keuangan sebesar 93,63%, fisik 90,68%.
	<ul style="list-style-type: none"> Program Peningkatan Kesempatan Kerja 	Jumlah anggaran sebesar Rp. 13.603.214.796, jumlah kegiatan sebanyak 24, dengan realisasi keuangan sebesar 95,20%, fisik 92,18%.
Ketahanan Pangan		
	<ul style="list-style-type: none"> Program Peningkatan Ketahanan Pangan 	Jumlah anggaran sebesar Rp. 17.534.383.401,00, jumlah kegiatan sebanyak 17, dengan realisasi keuangan sebesar 81,96%, fisik 81,96%.
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018

No.	Urusan	Capaian Program
	<ul style="list-style-type: none"> Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 	Jumlah anggaran sebesar Rp. 2.367.040.625,00, jumlah kegiatan sebanyak 4, dengan realisasi keuangan sebesar 87,40%, fisik 87,40%.
	<ul style="list-style-type: none"> Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak 	Jumlah anggaran sebesar Rp. 10.259.749.237,00, jumlah kegiatan sebanyak 13, dengan realisasi keuangan sebesar 87,40%, fisik 87,40%.
	<ul style="list-style-type: none"> Program Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga. 	Jumlah anggaran sebesar Rp. 7.093.299.219,00, jumlah kegiatan sebanyak 2, dengan realisasi keuangan sebesar 77,95%, fisik 77,95%.
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera		
	<ul style="list-style-type: none"> Program Pelayanan Keluarga Berencana 	Jumlah anggaran sebesar Rp. 1.191.980.625,00, jumlah kegiatan sebanyak 1, dengan realisasi keuangan sebesar 94,86%, fisik 94,86%.
	<ul style="list-style-type: none"> Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). 	Jumlah anggaran sebesar Rp. 452.552.032,00, jumlah kegiatan sebanyak 1, dengan realisasi keuangan sebesar 94,86%, fisik 94,86%.
Perhubungan		
	<ul style="list-style-type: none"> Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 	Jumlah anggaran sebesar Rp. 158.936.837.987,00, jumlah kegiatan sebanyak 21, dengan realisasi keuangan sebesar 72,23%, fisik 77,62%.
	<ul style="list-style-type: none"> Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ); 	Jumlah anggaran sebesar Rp. 31.297.614.800,00, jumlah kegiatan sebanyak 5, dengan realisasi keuangan sebesar 89,64%, fisik 100,00%.
	<ul style="list-style-type: none"> Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 	Jumlah anggaran sebesar Rp. 4.208.970.000,00, jumlah kegiatan sebanyak 7, dengan realisasi keuangan sebesar 68,47%, fisik 89,39%.
	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 	Jumlah anggaran sebesar Rp. 4.515.000.000,00, jumlah kegiatan sebanyak 3, dengan realisasi keuangan sebesar 76,38%, fisik 92,66%.
	<ul style="list-style-type: none"> Program Peningkatan Kelayakan Kendaraan Bermotor 	Jumlah anggaran sebesar Rp. 418.015.000,00, jumlah kegiatan sebanyak 2, dengan realisasi keuangan sebesar 87,39%, fisik 100,00%.
Komunikasi dan Informatika		
	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi 	Jumlah anggaran sebesar Rp. 56.502.045.777,00, jumlah kegiatan sebanyak 55, dengan realisasi keuangan sebesar 93,58%, fisik 94,01%.
Pertanahan		
	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengadaan, Penataan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan 	Jumlah anggaran sebesar Rp. 537.407.564.220,00, jumlah kegiatan sebanyak 5, dengan realisasi keuangan sebesar 95,59%, fisik 95,59%.
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri		
	<ul style="list-style-type: none"> Program Pendidikan Politik Masyarakat 	Jumlah anggaran sebesar Rp. 6.750.252.075,00, jumlah kegiatan sebanyak 13, dengan realisasi keuangan sebesar 90,63%, fisik 94,62%.
	<ul style="list-style-type: none"> Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 	Jumlah anggaran sebesar Rp. 7.097.267.700,00, jumlah kegiatan sebanyak 15, dengan realisasi keuangan sebesar 71,09%, fisik 74,56%.
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian		
	<ul style="list-style-type: none"> Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah 	Jumlah anggaran sebesar Rp. 50.714.827.785,00, jumlah kegiatan sebanyak 96, dengan realisasi keuangan sebesar 84,56%, fisik 85,09%.
	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengembangan Kompetensi Aparatur 	Jumlah anggaran sebesar Rp. 66.419.904.203,00, jumlah kegiatan sebanyak 59, dengan realisasi keuangan sebesar 76,42%, fisik 76,33%.
	<ul style="list-style-type: none"> Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur 	Jumlah anggaran sebesar Rp. 62.380.116.426,00, jumlah kegiatan sebanyak 129, dengan realisasi keuangan sebesar 85,50%, fisik 98,53%.
	<ul style="list-style-type: none"> Program Pelayanan Administrasi 	Jumlah anggaran sebesar Rp. 477.235.740.727,00,

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018

No.	Urusan	Capaian Program
	Perkantoran	jumlah kegiatan sebanyak 213, dengan realisasi keuangan sebesar 89,73%, fisik 91,53%.
	• Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah anggaran sebesar Rp. 650.875.212.674,00, jumlah kegiatan sebanyak 223, dengan realisasi keuangan sebesar 89,14%, fisik 91,41%.
	• Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah anggaran sebesar Rp. 273.378.084.618,00, jumlah kegiatan sebanyak 180, dengan realisasi keuangan sebesar 91,49%, fisik 94,81%.
	• Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Kesadaran Hukum dan HAM	Jumlah anggaran sebesar Rp. 19.355.069.550,00, jumlah kegiatan sebanyak 16, dengan realisasi keuangan sebesar 90,72%, fisik 90,78%.
	• Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah anggaran sebesar Rp. 52.038.979.325,00, jumlah kegiatan sebanyak 5, dengan realisasi keuangan sebesar 79,39%, fisik 76,21%.
	• Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah	Jumlah anggaran sebesar Rp. 27.018.653.578,00, jumlah kegiatan sebanyak 49, dengan realisasi keuangan sebesar 70,88%, fisik 72,44%.
	• Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah anggaran sebesar Rp. 8.233.168.650,00, jumlah kegiatan sebanyak 63, dengan realisasi keuangan sebesar 84,07%, fisik 84,95%.
	• Program Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan	Jumlah anggaran sebesar Rp. 19.406.956.950,00, jumlah kegiatan sebanyak 25, dengan realisasi keuangan sebesar 96,79%, fisik 98,85%.
Pemberdayaan Masyarakat Desa		
	• Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Jumlah anggaran sebesar Rp. 28.723.193.100,00, jumlah kegiatan sebanyak 18, dengan realisasi keuangan sebesar 68,06%, fisik 68,06%.
	• Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa	Jumlah anggaran sebesar Rp. 9.196.927.500,00, jumlah kegiatan sebanyak 10, dengan realisasi keuangan sebesar 48,85%, fisik 48,85%.
	• Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan	Jumlah anggaran sebesar Rp. 3.907.032.000,00, jumlah kegiatan sebanyak 1, dengan realisasi keuangan sebesar 70,90%, fisik 70,90%.
	• Program peningkatan dan pembinaan peran serta masyarakat dalam pembangunan	Jumlah anggaran sebesar Rp. 2.733.325.000,00, jumlah kegiatan sebanyak 3, dengan realisasi keuangan sebesar 78,23%, fisik 78,23%.
Sosial		
	• Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah anggaran sebesar Rp. 21.265.547.200,00, jumlah kegiatan sebanyak 18, dengan realisasi keuangan sebesar 92,64%, fisik 92,64%.
	• Program Pemberdayaan Sosial	Jumlah anggaran sebesar Rp. 1.498.284.000,00, jumlah kegiatan sebanyak 6, dengan realisasi keuangan sebesar 90,92%, fisik 90,92%.
	• Program Perlindungan Sosial	Jumlah anggaran sebesar Rp. 19.751.244.866,00, jumlah kegiatan sebanyak 9, dengan realisasi keuangan sebesar 98,28%, fisik 98,28%.
	• Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah anggaran sebesar Rp. 12.307.024.500,00, jumlah kegiatan sebanyak 25, dengan realisasi keuangan sebesar 95,12%, fisik 95,12%.
	• Program Pendayagunaan dan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).	Jumlah anggaran sebesar Rp. 5.262.688.000,00, jumlah kegiatan sebanyak 8, dengan realisasi keuangan sebesar 96,00%, fisik 96,00%.
Kebudayaan		
	• Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah anggaran sebesar Rp. 33.098.401.475,00, jumlah kegiatan sebanyak 45, dengan realisasi keuangan sebesar 74,06%, fisik 80,90%.
	• Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	Jumlah anggaran sebesar Rp. 24.181.490.078,00, jumlah kegiatan sebanyak 42, dengan realisasi keuangan sebesar 92,95%, fisik 92,95%.
Statistik		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018

No.	Urusan	Capaian Program
	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 	Jumlah anggaran sebesar Rp. 18.312.412.500,00, jumlah kegiatan sebanyak 54, dengan realisasi keuangan sebesar 90,99%, fisik 92,23%.
Kearsipan		
	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengembangan Kearsipan 	Jumlah anggaran sebesar Rp. 1.144.848.150,00, jumlah kegiatan sebanyak 5, dengan realisasi keuangan sebesar 95,84%, fisik 95,84%.
Perpustakaan		
	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan. 	Jumlah anggaran sebesar Rp. 4.502.592.100,00, jumlah kegiatan sebanyak 8, dengan realisasi keuangan sebesar 98,55%, fisik 98,55%.
Perikanan dan Kelautan		
	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengembangan Budidaya Perikanan 	Jumlah anggaran sebesar Rp. 36.785.591.116,00, jumlah kegiatan sebanyak 26, dengan realisasi keuangan sebesar 95,99%, fisik 95,99%.
	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengembangan Perikanan Tangkap 	Jumlah anggaran sebesar Rp. 4.809.326.500,00, jumlah kegiatan sebanyak 5, dengan realisasi keuangan sebesar 95,16%, fisik 95,16%.
Pertanian		
	<ul style="list-style-type: none"> Program Peningkatan Produksi Pertanian 	Jumlah anggaran sebesar Rp. 59.026.997.315,00, jumlah kegiatan sebanyak 100, dengan realisasi keuangan sebesar 94,04%, fisik 96,50%.
	<ul style="list-style-type: none"> Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian 	Jumlah anggaran sebesar Rp. 63.374.050.353,00, jumlah kegiatan sebanyak 34, dengan realisasi keuangan sebesar 96,53%, fisik 96,61%.
	<ul style="list-style-type: none"> Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan 	Jumlah anggaran sebesar Rp. 31.380.426.200,00, jumlah kegiatan sebanyak 17, dengan realisasi keuangan sebesar 92,82%, fisik 93,71%.
	<ul style="list-style-type: none"> Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan. 	Jumlah anggaran sebesar Rp. 11.594.554.600,00, jumlah kegiatan sebanyak 35, dengan realisasi keuangan sebesar 93,27%, fisik 94,27%.
Kehutanan		
	<ul style="list-style-type: none"> Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 	Jumlah anggaran sebesar Rp. 6.979.260.000,00, jumlah kegiatan sebanyak 12, dengan realisasi keuangan sebesar 92,26%, fisik 92,26%.
Perindustrian		
	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 	Jumlah anggaran sebesar Rp. 12.463.396.250,00, jumlah kegiatan sebanyak 21, dengan realisasi keuangan sebesar 88,37%, fisik 88,37%.
	<ul style="list-style-type: none"> Program Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 	Jumlah anggaran sebesar Rp. 6.488.704.450,00, jumlah kegiatan sebanyak 23, dengan realisasi keuangan sebesar 77,26%, fisik 80,91%.
Perdagangan		
	<ul style="list-style-type: none"> Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri 	Jumlah anggaran sebesar Rp. 6.370.469.900,00, jumlah kegiatan sebanyak 24, dengan realisasi keuangan sebesar 66,73%, fisik 70,36%.
	<ul style="list-style-type: none"> Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 	Jumlah anggaran sebesar Rp. 2.051.302.875,00, jumlah kegiatan sebanyak 14, dengan realisasi keuangan sebesar 93,87%, fisik 94,47%.
	<ul style="list-style-type: none"> Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 	Jumlah anggaran sebesar Rp. 12.596.967.675,00, jumlah kegiatan sebanyak 13, dengan realisasi keuangan sebesar 78,53%, fisik 78,28%.
Pariwisata		
	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengembangan Destinasi Wisata 	Jumlah anggaran sebesar Rp. 9.952.126.875,00, jumlah kegiatan sebanyak 14, dengan realisasi keuangan sebesar 87,90%, fisik 87,90%.
	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 	Jumlah anggaran sebesar Rp. 7.100.512.475,00, jumlah kegiatan sebanyak 10, dengan realisasi

No.	Urusan	Capaian Program
		keuangan sebesar 95,44%, fisik 100,00%.
Energi dan Sumber Daya Mineral		
	• Program Pembinaan, Pengembangan Sumber Daya Mineral, Geologi dan Air Tanah	Jumlah anggaran sebesar Rp. 4.837.754.000,00, jumlah kegiatan sebanyak 18, dengan realisasi keuangan sebesar 61,38%, fisik 64,27%.
	• Program Pembinaan, Pengembangan Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan Energi	Jumlah anggaran sebesar Rp. 85.400.659.857,00, jumlah kegiatan sebanyak 13, dengan realisasi keuangan sebesar 98,66%, fisik 99,79%.
	• Program Pembinaan, Pengembangan Panas Bumi dan Migas	Jumlah anggaran sebesar Rp. 1.423.638.200,00, jumlah kegiatan sebanyak 4, dengan realisasi keuangan sebesar 93,89%, fisik 99,24%.
Ketransmigrasian		
	• Program Pengembangan Transmigrasi	Jumlah anggaran sebesar Rp. 5.195.662.550,00, jumlah kegiatan sebanyak 9, dengan realisasi keuangan sebesar 93,89%, fisik 99,24%.
Urusan Keagamaan (Pusat)		
	• Program Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan	Jumlah anggaran sebesar Rp. 6.911.085.580,00, jumlah kegiatan sebanyak 5, dengan realisasi keuangan sebesar 96,60%, fisik 96,60%.
	• Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama	Jumlah anggaran sebesar Rp. 17.442.709.040,00, jumlah kegiatan sebanyak 6, dengan realisasi keuangan sebesar 92,93%, fisik 92,93%.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan APBD tahun 2015, jumlah belanja langsung (BL) sebesar Rp. 6.066.243.593.486, dengan realisasi mencapai 88,79% (Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 sebelum audit BPK RI). Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai pelaksanaan 26 bidang urusan wajib dan 8 bidang urusan pilihan.

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja program mengacu pada target RPJMD berdasarkan Urusan dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Urusan Pendidikan

Urusan pendidikan didukung 6 (enam) program, tetapi implementasinya hanya 2 (dua) program yang mempunyai indikator kinerja program (*out come*) yang diukur, yaitu 1)program pendidikan menengah dan tinggi dengan indikator kinerja apk sekolah menengah dengan target capaian kinerja RPJMD tahun 2018 sebesar 95,5 dan realisasi target kinerja pada 2014 mencapai sebesar 72,83 sedangkan untuk target RKPD tahun 2015 sebesar 87,48 dan realisasi mencapai sebesar 61,19 dengan tingkat realisasi sebesar 69,94%. Selain itu target

RKPD tahun berjalan tahun 2016 sebesar 92,8 tetapi sampai saat ini belum dapat diperkirakan realisasi capaian target RPJMD nya; 2) program pendidikan usia dini formal dan informal nonformal dengan indikator kinerja angka melek huruf yang target capaian kinerja RPJMD Tahun 2018 sebesar 99,00 – 99,50 dan realisasi target kinerja pada tahun 2014 mencapai sebesar 98,29 sedangkan untuk target RKPD tahun 2015 sebesar 98,00 – 98,50 dan realisasi mencapai sebesar 98,29 dengan tingkat realisasi sebesar 99,76%, selain itu untuk target RKPD tahun berjalan tahun 2016 sebesar 98,5 – 99,00 tetapi sampai saat ini belum dapat diperkirakan realisasi capaian target RPJMD-nya; dan terdapat 2 program yaitu program pendidikan nonformal, dan program pendidikan luar biasa yang terindikasi tidak tercantum dalam dokumen RPJMD tetapi tercantum dalam RKPD dan APBD. Disisi lain, terdapat program pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus yang tidak ada dalam RKPD maupun APBD.

2. Urusan Kesehatan

Urusan kesehatan didukung 10 (sepuluh) program tetapi tidak terdapat satupun indikator program yang diukur. Dari 10 program, terdapat 4 program tidak tercantum dalam dokumen RPJMD atau memiliki nomenklatur berbeda dengan yang tercantum dokumen RKPD dan APBD, yaitu program upaya kesehatan, program manajemen pelayanan kesehatan, program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, dan program peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan. Terdapat pula 3 program di RPJMD dan APBD tetapi tidak tercantum atau tidak sesuai nomenklturnya dengan RKPD, yaitu program promosi kesehatan, program pengembangan lingkungan sehat, dan program manajemen kesehatan. Sementara untuk 3 program lainnya, indikator kinerja programnya tidak tersedia capaian, yaitu program pelayanan kesehatan, program pengendalian penyakit menular dan tidak menular, dan program sumber daya kesehatan. Dengan kondisi demikian, pencapaian urusan kesehatan bukan merupakan kesimpulan dari capaian indikator kinerja programnya.

3. Urusan Lingkungan Hidup

Urusan lingkungan hidup didukung 4 (empat) program, implementasinya terdapat 3 program yang mempunyai Indikator Kinerja Program (*out come*), yaitu 1) Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dengan indikator kinerja pencapaian status mutu sungai utama dan waduk besar dengan tingkat cemar sedang yang target capaian kinerja RPJMD Tahun 2018 sebesar 12,30 – 13,00 dan realisasi target kinerja pada tahun 2014 mencapai sebesar 13,4 sedangkan untuk target RKPD tahun 2015 sebesar 10,8 – 11,2 dan realisasi mencapai sebesar 23,45 dengan tingkat realisasi sebesar 209,38%, selain itu untuk target RKPD tahun berjalan tahun 2016 sebesar 11,20 – 11,70 tetapi sampai saat ini belum dapat diperkirakan realisasi capaian target RPJMD nya; 2). Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dengan indikator kinerja Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang target capaian kinerja RPJMD Tahun 2018 sebesar 7 dan realisasi target kinerja pada tahun 2014 mencapai sebesar 2,7 (bidang fisik tahun 2013), sedangkan untuk target RKPD tahun 2015 sebesar 4 - 5 dan realisasi mencapai sebesar 3,19 (belum termasuk bidang kehutanan), selain itu untuk target RKPD tahun berjalan tahun 2016 sebesar 6 tetapi sampai saat ini belum dapat diperkirakan realisasi capaian target RPJMD nya; 3) program pengelolaan kawasan lindung hidup dengan indikator kinerja capaian fungsi kawasan lindung terhadap luas wilayah yang target capaian kinerja RPJMD Tahun 2018 sebesar 96 dan realisasi target kinerja pada tahun 2014 mencapai sebesar 37,2 sedangkan untuk target RKPD tahun 2015 sebesar 38 - 39 dan realisasi mencapai sebesar 37,20 dengan tingkat realisasi sebesar 95,38%, selain itu untuk target RKPD tahun berjalan tahun 2016 dan realisasi capaian target RPJMD belum terukur; sedangkan untuk 1 program yang lainnya yaitu Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup tidak terdapat indikator kinerja capaian yang mendukung terhadap program tersebut.

4. Urusan Pekerjaan Umum

Urusan pekerjaan umum didukung 9 (sembilan) program, tetapi implementasinya hanya didukung oleh 3 program yang mempunyai Indikator Kinerja Program (out come), yaitu 1) Program pembangunan jalan dan jembatan dengan indikator kinerja tingkat kemantapan jalan provinsi (kondisi baik & sedang) yang target capaian kinerja RPJMD Tahun 2018 sebesar 97,50 - 98,0095,5 dan realisasi target kinerja pada tahun 2014 mencapai sebesar 97,68 sedangkan untuk target RKPD tahun 2015 sebesar 97,2 - 97,5 dan realisasi mencapai sebesar 97,80 dengan tingkat realisasi sebesar 100,31%, selain itu untuk target RKPD tahun berjalan tahun 2016 sebesar 97,30 - 97,60 tetapi sampai saat ini belum dapat diperkirakan realisasi capaian target RPJMD nya; 2) program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan dengan indikator kinerja tingkat kemantapan jalan provinsi (kondisi baik & sedang) yang target capaian kinerja RPJMD Tahun 2018 sebesar 97,50 - 98,0095,5 dan realisasi target kinerja pada tahun 2014 mencapai sebesar 97,68 sedangkan untuk target RKPD tahun 2015 sebesar 97,2 - 97,5 dan realisasi mencapai sebesar 97,80 dengan tingkat realisasi sebesar 100,31%, selain itu untuk target RKPD tahun berjalan tahun 2016 sebesar 97,30 - 97,60 tetapi sampai saat ini belum dapat diperkirakan realisasi capaian target RPJMD nya; 3) program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya dengan indikator kinerja tingkat kondisi baik jaringan irigasi di daerah irigasi kewenangan provinsi yang target capaian kinerja RPJMD Tahun 2018 sebesar 86,00-90,00 dan realisasi target kinerja pada tahun 2014 mencapai sebesar 67,37 sedangkan untuk target RKPD tahun 2015 sebesar 71 - 78 dan realisasi mencapai sebesar 69,65 dengan tingkat realisasi sebesar 91,64%, selain itu untuk target RKPD tahun berjalan tahun 2016 sebesar 76,00-81,00 tetapi sampai saat ini belum dapat diperkirakan realisasi capaian target RPJMD nya; ada 5 program lainnya terindikasi tidak terdapat indikator kinerja capaian yang mendukung terhadap program tersebut yaitu program pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan, program peningkatan sarana dan prasarana

kebinamargaan, program inspeksi kondisi jalan dan jembatan, program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya, program pengendalian banjir serta kekeringan dan pengamanan pantai, dan 1 program lainnya yaitu program pengendalian banjir dan pengamanan pantai tidak terdapat didalam dokumen RPJMD tetapi ada di dokumen RKPD dan APBD.

5. Urusan Perumahan

Urusan perumahan didukung 4 (empat) program, tetapi implementasinya hanya didukung 1 (satu) program yaitu program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman dengan indikator kinerja cakupan pelayanan air minum yang target capaian kinerja RPJMD Tahun 2018 sebesar 74,00-76,00 dan realisasi target kinerja pada tahun 2014 mencapai sebesar 65,43 sedangkan untuk target RKPD tahun 2015 sebesar 63 - 70 dan realisasi mencapai sebesar 67,13 dengan tingkat realisasi sebesar 95,90%, selain itu untuk target RKPD tahun berjalan tahun 2016 sebesar 70,00 – 73,00 tetapi sampai saat ini belum dapat diperkirakan realisasi capaian target RPJMD nya; selain itu terdapat 1 program yang tidak ada di dokumen RKPD dan APBD tetapi ada di RPJMD yaitu program pengembangan perumahan dan kawasan permukiman; begitu pula sebaliknya ada 1 program yang tidak ada di RPJMD tetapi ada di RKPD dan APBD yaitu program pengembangan perumahan; serta terdapat 1 program yaitu program pembinaan jasa konstruksi tidak terdapat indikator kinerja capaian yang mendukung terhadap program tersebut.

6. Urusan Penataan Ruang

Urusan penataan ruang terdiri atas 1 (satu) program yaitu program penataan ruang, yang tidak terdapat indikator kinerja capaian yang mendukung terhadap program tersebut, sehingga tidak dapat diukur capaian kinerjanya

7. Urusan Perencanaan Pembangunan

Urusan perencanaan pembangunan terdiri dari 3 (tiga) program, yaitu program kerjasama pembangunan, program perencanaan,

pengendalian dan pengawasan pembangunan daerah, dan program penelitian, studi dan survei yang tidak terdapat indikator kinerja capaian yang mendukung terhadap program tersebut, sehingga tidak dapat diukur capaian kerjanya.

8. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Urusan kepemudaan dan olahraga terdiri dari 2 (dua) program, yaitu program peningkatan dan pembinaan peran serta pemuda, program pembinaan, pemasyarakatan dan pengembangan olahraga yang tidak terdapat indikator kinerja capaian yang mendukung terhadap program tersebut, sehingga tidak dapat diukur capaian kerjanya.

9. Urusan Penanaman Modal

Urusan penanaman modal didukung oleh 1 (satu) yaitu program peningkatan iklim, promosi dan kerjasama investasi dengan indikator kinerja nilai investasi PMA – PMDN yang target capaian kinerja RPJMD Tahun 2018 sebesar 138,85-154,00 dan realisasi target kinerja pada tahun 2014 mencapai sebesar 62,83, sedangkan untuk target RKPD tahun 2015 sebesar 96,81 - 107,79 dan realisasi mencapai sebesar 121,5 dengan tingkat realisasi sebesar 112,72%, selain itu untuk target RKPD tahun berjalan tahun 2016 sebesar 107,79-121,80 tetapi sampai saat ini belum dapat diperkirakan realisasi capaian target RPJMD nya.

10. Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Urusan koperasi usaha kecil dan menengah didukung oleh 3 (tiga) program yaitu 1) program pengembangan sistem pendukung usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dengan indikator kinerja jumlah KUMKM berdaya saing yang target capaian kinerja RPJMD Tahun 2018 sebesar 250 dan realisasi target kinerja pada tahun 2014 mencapai sebesar 275, sedangkan untuk target RKPD tahun 2015 sebesar 324 dan realisasi mencapai sebesar 324,00 dengan tingkat realisasi sebesar 100%, selain itu untuk target RKPD tahun berjalan tahun 2016 sebesar 200 tetapi sampai saat ini belum dapat diperkirakan realisasi capaian target RPJMD nya; 2) program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah dengan indikator

kinerja jumlah wirausaha baru per tahun yang target capaian kinerja rpjmd tahun 2018 sebesar 20000 dan realisasi target kinerja pada tahun 2014 mencapai sebesar 300, sedangkan untuk target RKPD tahun 2015 sebesar 20000 dan realisasi mencapai sebesar 20977 dengan tingkat realisasi sebesar 104,89%, selain itu untuk target RKPD tahun berjalan tahun 2016 sebesar 20000 tetapi sampai saat ini belum dapat diperkirakan realisasi capaian target RPJMD nya; 3)program pembinaan dan pengembangan bumd dan lembaga keuangan nonperbankan dengan indikator kinerja pendapatan asli daerah yang target capaian kinerja RPJMD Tahun 2018 sebesar 83,65 dan realisasi target kinerja pada tahun 2014 mencapai sebesar 12,36, sedangkan untuk target RKPD tahun 2015 sebesar 84,61 dan belum ada angka capaian, selain itu untuk target RKPD tahun berjalan tahun 2016 sebesar 84,36 tetapi sampai saat ini belum dapat diperkirakan realisasi capaian target RPJMD nya.

11. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Urusan kependudukan dan catatan sipil terdiri dari 1 (satu) program yaitu program penataan administrasi kependudukan, yang tidak terdapat indikator kinerja capaian yang mendukung terhadap program tersebut, sehingga tidak dapat diukur capaian kerjanya.

12. Urusan Ketenagakerjaan

Urusan Ketenagakerjaan terdiri dari 3 (tiga) program, yaitu program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan, dan program peningkatan kesempatan kerja, yang tidak terdapat indikator kinerja capaian yang mendukung terhadap program tersebut, sehingga tidak dapat diukur capaian kerjanya.

13. Urusan Ketahanan Pangan

Urusan ketahanan pangan didukung 1 (satu) program yaitu program peningkatan ketahanan pangan dengan 5 (lima) indikator kinerja program (*outcome*), dalam perencanaan pelaksanaannya pada tahun anggaran 2015 s/d tahun berjalan tidak ada satupun indikator yang digunakan sehingga tidak bisa diukur keberhasilan ketercapaian target.

14. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam rkpdpd 2015 didukung 3 (tiga) program, yaitu (1) program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan; (2) program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan dan perlindungan perempuan dan anak; dan satu program tidak ada di rkpdpd yaitu (3) program ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga dengan 8 (delapan) indikator kinerja program (*outcome*), dalam perencanaan pelaksanaannya pada tahun anggaran 2015 s.d tahun berjalan hanya satu indikator kinerja yang digunakan, yaitu indeks pemberdayaan gender untuk program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan. Dengan target capaian kinerja RPJMD tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) 75 poin, pada tahun 2014 tercapai 70 poin dan target RKPD tahun 2015 72,02 poin belum ada angka realisasi capaiannya, untuk target RKPD tahun 2016 73 poin.

15. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera didukung 3 (tiga) program yaitu (1) program pelayanan keluarga berencana; (2) program pendewasaan usia perkawinan (PUP) dan satu program yang tidak ada di RPJMD 2013-2018 yaitu program keluarga terencana (NA RPJMD); dengan 3 (tiga) indikator kinerja program (*outcome*). Dalam perencanaan pelaksanaannya pada tahun anggaran 2015 s/d tahun berjalan tidak ada satupun indikator yang digunakan sehingga tidak bisa diukur keberhasilan ketercapaian target.

16. Urusan Perhubungan

Urusan perhubungan didukung 5 (lima) program, yaitu (1) program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan; (2) program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas lalu lintas angkutan jalan (LLAJ); (3) program peningkatan pelayanan angkutan; (4) program pengendalian dan pengamanan lalu lintas dan; (5) program peningkatan kelayakan kendaraan bermotor, dengan 7 (tujuh) indikator kinerja program (*outcome*), dalam perencanaan pelaksanaannya pada tahun

anggaran 2015 s.d tahun berjalan tidak ada satupun indikator yang digunakan sehingga tidak bisa diukur keberhasilan ketercapaian target.

17. Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan komunikasi dan informatika didukung 1 (satu) program, yaitu program pengembangan komunikasi, informasi, media massa, dan pemanfaatan teknologi informasi dan pemanfaatan teknologi informasi dengan 9 (sembilan) indikator kinerja program (*outcome*). Dalam perencanaan pelaksanaannya pada tahun anggaran 2015 s/d tahun berjalan hanya satu indikator kinerja yang digunakan yaitu jumlah penduduk melek TIK usia 12 tahun ke atas, dengan target capaian kinerja RPJMD tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) 18.359.814 orang, pada tahun 2014 tercapai 11.400.000 orang dan target RKPD tahun 2015 13.794.000 orang, untuk target RKPD tahun 2016 15.173.000 orang.

18. Urusan Pertanahan

Urusan pertanahan didukung 1 (satu) program, yaitu program pengadaan, penataan dan pengendalian administrasi dengan 1 (satu) indikator kinerja program (*outcome*). Dalam perencanaan pelaksanaannya pada tahun anggaran 2015 s/d tahun berjalan tidak ada satupun indikator yang digunakan sehingga tidak bisa diukur keberhasilan ketercapaian target.

19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri didukung 2 (dua) program, yaitu program pendidikan politik masyarakat dan program pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja program (*outcome*). dalam perencanaan pelaksanaannya pada tahun anggaran 2015 s.d tahun berjalan tidak ada satupun indikator yang digunakan sehingga tidak bisa diukur keberhasilan ketercapaian target.

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, keuangan daerah, kepegawaian dan persandian didukung 13 (tiga belas) program, yaitu (1) program pemantapan otonomi daerah dan sistem administrasi; (2) program pengembangan kompetensi aparatur; (3) program peningkatan kesejahteraan sumber daya aparatur; (4) program pelayanan administrasi perkantoran; (5) program peningkatan sarana dan prasarana aparatur; (6) program pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur; (7) program penataan peraturan perundang-undangan, kesadaran hukum dan ham; (8) program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah; (9) program pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah; (10) program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan; (11) program pengendalian dan pengawasan pembangunan, dan ada dua program yang tidak ada di RPJMD 2013-2018 yaitu (12) program pembinaan dan pengembangan aparatur (NA RPJMD); (13) program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (NA RPJMD); dengan 24 (duapuluh empat) indikator kinerja program (*outcome*). dalam perencanaan pelaksanaannya pada tahun anggaran 2015 s/d tahun berjalan hanya satu indikator kinerja yang digunakan yaitu indeks kepuasan masyarakat, dengan target capaian kinerja RPJMD tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) nilai 4 dalam mutu untuk pelayanan yang bermutu dan akuntabel di seluruh tingkatan pemerintahan daerah, pada tahun 2014 tercapai nilai 3 dan target RKPD tahun 2015 nilai 4 dengan realisasi nilai 3, untuk target RKPD tahun 2016 nilai 4.

21. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa didukung 5 (lima) program yaitu (1) program peningkatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat; (2) program pemantapan pemerintahan dan pembangunan desa; (3) program peningkatan infrastruktur perdesaan; (4) program peningkatan dan pembinaan peran serta masyarakat, dan satu program tidak ada di RPJMD 2013-2018 yaitu (5) program peningkatan partisipasi masyarakat (NA RPJMD); dengan 8 (delapan) indikator kinerja

program (*outcome*). Dalam perencanaan pelaksanaannya pada tahun anggaran 2015 s.d tahun berjalan hanya 2 (dua) indikator kinerja yang digunakan yaitu, tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan perdesaan pada program peningkatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat dengan target capaian kinerja RPJMD tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) 75%, pada tahun 2014 tercapai 55% dan target RKPD tahun 2015 60% untuk target RKPD tahun 2016 65% dan indikator tingkat ketersediaan infrastruktur desa dan perdesaan pada program peningkatan infrastruktur perdesaan dengan target capaian kinerja RPJMD tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) 75%, pada tahun 2014 tercapai 55% dan target RKPD tahun 2015 60% untuk target RKPD tahun 2016 65%.

22. Urusan Sosial

Urusan sosial didukung 7 (tujuh) program yaitu (1) program pendayagunaan dan pemberdayaan potensi sumber; (2) program penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan perlindungan masyarakat; (3) program pelayanan dan rehabilitasi sosial; (4) program pemberdayaan sosial; (5) program perlindungan sosial; dan ada dua program yang tidak ada di RPJMD 2013-2018 yaitu (6) program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Lainnya (NA RPJMD); (7) program pemantapan kelembagaan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) (NA RPJMD), dengan 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja program (*outcome*). Dalam perencanaan pelaksanaannya pada tahun anggaran 2015 s.d. tahun berjalan hanya 6 (enam) indikator kinerja yang digunakan yaitu jumlah PMKS (jumlah korban penyalhgunaan napza yang ditangani, jumlah anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang ditangani, jumlah anak jalanan yang ditangani, jumlah penyandang disabilitas yang ditangani, jumlah gelandangan yang ditangani, jumlah wanita tuna susila yang ditangani) pada Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dengan target capaian kinerja RPJMD tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) 771.845 orang, pada tahun 2014 tercapai 2.582 orang dan target RKPD tahun 2015 yaitu 579.899 orang dengan realisasi 18.650 orang atau 3,22%

untuk target RKPD tahun 2016 yaitu 637.888 orang. Capaian jumlah PMKS yang ditangani s.d 2015 yaitu 500.487 orang dari 771.845 orang atau 65%.

23. Urusan Kebudayaan

Urusan kebudayaan dalam didukung 2 (dua) program,yaitu program pengembangan nilai budaya dan program pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya dengan 5 (lima) indikator kinerja program (*outcome*). Dalam perencanaan pelaksanaannya pada tahun anggaran 2015 s.d. tahun berjalan hanya 2 (dua) indikator kinerja yang digunakan, yaitu Jumlah Karya Seni dan Budaya yang didaftarkan untuk memperoleh HAKI/sertifikasi Badan Internasional di bidang budaya dengan target capaian kinerja RPJMD tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) 10 usulan, pada tahun 2014 tercapai 3 usulan dan target RKPD tahun 2015 1usulan dengan realisasi 1usulan atau 100% untuk target RKPD tahun 2016 7usulan, dan jumlah karya seni dan budaya yang didaftarkan untuk memperoleh HAKI/sertifikasi Badan Internasional di bidang seni tradisi dengan target capaian kinerja RPJMD tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) 1 seni tradisi.

24. Urusan Statistik

Urusan statistik didukung 1 (satu) program, yaitu program pengembangan data/informasi/statistik daerah dengan 2 (dua) indikator kinerja program (*outcome*). Dalam perencanaan pelaksanaannya pada tahun anggaran 2015 s.d.tahun berjalan hanya 1(satu) indikator kinerja yang digunakan, yaitu persentase pemenuhan kebutuhan data/informasi/statistik daerah dengan target capaian kinerja RPJMD tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) 90%, pada tahun 2014 tercapai 60% dan target RKPD tahun 2015 75% dengan realisasi 75% atau 100% tercapai untuk target 2016 yaitu 80%.

25. Urusan Kearsipan

Urusan kearsipan didukung oleh 1 (satu) program, yaitu program pengembangan kearsipan, dengan indikator kinerja program yaitu jumlah pengembangan teknologi informasi untuk tata kearsipan pemerintah

daerah. Kondisi kinerja awal RPJMD Tahun 2013 untuk jumlah pengembangan teknologi informasi untuk tata kearsipan pemerintah daerah adalah 30%, sedangkan target kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2018 sebesar 100%. Capaian kinerja pada Tahun 2014 sebesar 21,28% dan pada Tahun 2015 sebesar 50%. Dengan demikian capaian kinerja sampai dengan Tahun 2015 adalah 50% dari target akhir periode RPJMD.

26. Urusan Perpustakaan

Urusan perpustakaan memuat 1 (satu) program, yaitu program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan, dengan 5 indikator kinerja program. Dari 5 indikator tersebut hanya 2 indikator yang memiliki capaian kinerja, yaitu tingkat pembinaan teknis kelembagaan semua jenis perpustakaan di Jawa Barat dan jumlah judul koleksi bahan perpustakaan di Jawa Barat. Kondisi kinerja awal RPJMD Tahun 2013 untuk jumlah judul koleksi bahan perpustakaan di Jawa Barat sebanyak 8.333 judul, sedangkan target kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2018 sebanyak 195.000 judul. Capaian kinerja pada Tahun 2014 sebanyak 2.100 judul dan pada Tahun 2015 sebanyak 1.143 judul. Dengan demikian capaian kinerja sampai dengan Tahun 2015 baru tercapai 5,35%, sebuah capaian kinerja rendah. Perlu kerja keras dari Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat untuk mencapai kinerja 100% pada akhir periode RPJMD. Sementara 3 (tiga) indikator kinerja lainnya tidak memberikan gambaran yang jelas, tidak ada capaiannya, sehingga keempat indikator tersebut perlu dipertimbangkan keberadaannya.

27. Urusan Perikanan dan Kelautan

Urusan perikanan dan kelautan didukung oleh 2 (dua) program, yaitu program pengembangan perikanan tangkap dan program pengembangan budidaya perikanan.

Program pengembangan perikanan tangkap terdiri dari 2 indikator, yaitu produksi perikanan tangkap dan jumlah pulau yang terawasi. Kondisi kinerja awal RPJMD Tahun 2013 untuk produksi perikanan

tangkap adalah 214.885 ton, sedangkan target kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2018 sebanyak 231.492 ton. Capaian kinerja pada Tahun 2014 sebanyak 214.507 ton dan pada Tahun 2015 sebanyak 214.507 ton. Dengan demikian capaian kinerja sampai dengan Tahun 2015 adalah 92,66% dari target akhir periode RPJMD. Sedangkan indikator kinerja jumlah pulau yang terawasi tidak memberikan gambaran yang jelas, tidak ada capaiannya. Sehingga penetapan indikator kinerja ini perlu dipertimbangkan.

Program pengembangan budidaya perikanan dengan indikator produksi perikanan budidaya. Kondisi kinerja awal RPJMD Tahun 2013 untuk produksi perikanan budidaya adalah 822.906 ton, sedangkan target kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2018 sebanyak 1.050.259,76 ton. Capaian kinerja pada Tahun 2014 sebanyak 992.320 ton dan pada Tahun 2015 sebanyak 992.320 ton. Dengan demikian capaian kinerja sampai dengan Tahun 2015 sebesar 94,48% dari target akhir periode RPJMD.

28. Urusan Pertanian

Urusan pertanian didukung oleh 4 program dengan 31 indikator kinerja program. Dari 31 indikator hanya 1 indikator yang ada capaiannya, yaitu untuk indikator meningkatnya produksi peternakan (jumlah produksi daging, jumlah produksi telur dan jumlah produksi susu), sedangkan 30 indikator lainnya tidak ada capaiannya. Oleh karena itu, penentuan indikator kinerja program perlu ditinjau kembali, baik jumlah maupun targetnya.

29. Urusan Kehutanan

Urusan kehutanan didukung oleh 4 program, dengan 5 indikator kinerja program. Dari 5 indikator program, hanya 2 indikator yang ada capaiannya, yaitu jumlah produksi kayu dan Capaian fungsi kawasan lindung terhadap luas wilayah, sedangkan 3 indikator lainnya tidak ada capaiannya.

30. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Urusan energi dan sumber daya mineral terdiri dari 3 program, yaitu : (1) Program Pengembangan Panas Bumi dan Migas yang berproduksi di 6 (enam) wilayah kerja sampai dengan Tahun 2015 telah beroperasi di 4 (empat) wilayah kerja; (2) Program Pembinaan dan Pengembangan Urusan Ketenagalistrikan dan Energi dengan capaian rasio elektrifikasi rumah meningkat sebanyak 93,71%; (3) Program Pembinaan, Pengembangan Sumber Daya Mineral Geologi dan Air Tanah dengan capaian : (a) Tingkat pendayagunaan dan konservasi air tanah mencapai 65,34% pada Tahun 2015, (b) Tingkat pengelolaan perusahaan sumber daya mineral mencapai 56%, (c) tingkat mitigasi bencana alam geologi meningkat menjadi 85%.

31. Urusan Pariwisata

Urusan pariwisata terdiri dari 2 program, yaitu program pengembangan destinasi pariwisata dan program pengembangan pemasaran pariwisata dengan 7 indikator kinerja program, akan tetapi hanya 4 indikator saja yang memiliki capaian kinerja tahunan, yaitu jumlah event pariwisata, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Jawa Barat (target optimis), jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke obyek wisata di Jawa Barat, dan jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke akomodasi di Jawa Barat. Kondisi kinerja awal RPJMD Tahun 2013 untuk jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke obyek wisata di Jawa Barat adalah 29.000.000 orang, sedangkan target kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2018 sebanyak 46.704.790 orang. Capaian kinerja pada Tahun 2014 sebanyak 33.617.999 orang dan pada Tahun 2015 sebanyak 38.286.230 orang. Dengan demikian pada Tahun 2015 sudah tercapai sebesar 81,97% dari target akhir periode RPJMD.

32. Urusan Perindustrian

Urusan perindustrian didukung oleh 2 program, yaitu (1) program pengembangan industri kecil dan menengah, (2) program penataan struktur dan peningkatan kemampuan teknologi industri. Untuk program yang pertama memiliki 2 indikator, yaitu jumlah unit usaha industri kecil

menengah. Kondisi kinerja awal RPJMD Tahun 2013 untuk jumlah unit usaha industri kecil menengah adalah 245.234 unit, sedangkan target kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2018 sebanyak 265.425 unit. Capaian kinerja pada Tahun 2014 sebanyak 201.914 unit dan pada Tahun 2015 sebanyak 202.455 unit. Dengan demikian pada Tahun 2015 sudah tercapai sebesar 76,28% dari target akhir periode RPJMD. Sedangkan program yang kedua memiliki 2 indikator, akan tetapi capaian kedua indikator tersebut tidak pernah diukur, sehingga tidak jelas kontribusinya terhadap capaian program.

33. Urusan Perdagangan

Urusan perdagangan didukung oleh 3 program, yaitu (1) program peningkatan dan pengembangan sistem perdagangan dalam negeri, (2) program peningkatan dan pengembangan ekspor, dan (3) program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan. Untuk program yang pertama dan kedua memiliki 4 indikator kinerja, akan tetapi semua indikator tersebut tidak pernah diukur, sehingga kontribusi terhadap capaian kinerja program menjadi tidak jelas. Sedangkan untuk program yang ketiga memiliki 4 indikator, dan hanya 2 indikator yang memiliki nilai capaian kinerja, yaitu indikator jumlah penerapan UTTP sebesar 75,71%, dan jumlah pengujian BDKT per tahun sebesar 65,55% dari target akhir periode RPJMD.

34. Urusan Ketrasmigrasian

Urusan ketrasmigrasian sesuai RPJMD 2013-2018 terdiri dari 1 program, yaitu program pengembangan transmigrasi. Program tersebut tidak diakomodir didalam RKPD, akan tetapi ada didalam APBD. Hal ini menunjukkan ketidak konsistenan didalam penyusunan dokumen perencanaan. Ada 2 indikator kinerja pada program tersebut, yaitu (1) jumlah tidak lanjut kerja sama antar provinsi dibidang ketrasmigrasian, dan (2) jumlah calon transmigran, masyarakat kawasan transmigrasi lokal (*resettlement*) dan masyarakat sekitar yang dilatih, akan tetapi dua-duanya tidak memiliki capaian kinerja. Dengan demikian capaian kinerja program

tidak bisa ditetapkan. Oleh karena itu penentuan indikator kinerja program ini perlu ditinjau kembali baik jumlah maupun targetnya.

35. Urusan Keagamaan

Urusan keagamaan merupakan kewenangan pemerintah Pusat. Didalam RPJMD 2013-2018 urusan keagamaan terdiri dari 2 program, yaitu (1) Program peningkatan pemahaman dan pengamalan agama; (2) dan Program Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan. Jumlah indikator kinerja program sebanyak 5 indikator, akan tetapi semua indikator tersebut tidak memiliki arti karena tidak memiliki capaian kinerja. Dengan demikian capaian kinerja program tidak dapat diukur. Untuk itu perlu peninjauan kembali penetapan indikator kinerja program baik jumlah maupun targetnya.

2.2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Bedasarkan hasil evaluasi terhadap indikator kinerja daerah, indikator kinerja program RPJMD Tahun 2013-2018 dan RKPD Tahun 2015, serta capaian program dan kegiatan pada pelaksanaan APBD Tahun 2015, pemerintah Provinsi Jawa Barat telah berhasil mencapai target-target pembangunan yang telah ditentukan sesuai dengan target indikator kinerja daerah dan indikator kinerja program, namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut.

A. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

- 1) Pada urusan ketahanan pangan ditandai oleh masih rendahnya produktivitas, belum jelasnya cadangan dan pengadaan pangan, belum tercapainya target produksi komoditas pertanian dan peternakan. Permasalahannya: (a) alih fungsi lahan pertanian; (b) rendahnya kemampuan masyarakat dalam pengelolaan lembaga akses pangan masyarakat; (c) masih rendahnya diversifikasi pangan; (d) masih tingginya ketergantungan impor bahan pangan; (e) belum meratanya distribusi pangan.

- 2) Pada urusan pemberdayaan masyarakat desa yang ditunjukkan untuk kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa ditandai oleh masih rendahnya pendapatan dan tingginya tingkat pengangguran terbuka, serta masih tingginya urbanisasi. Permasalahannya: (a) terbatasnya kualitas dan kuantitas infrastruktur di perdesaan; (b) belum optimalnya pelayanan Pemerintahan desa terhadap masyarakat; (c) belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan; (d) masih rendahnya penggunaan Teknologi Tepat Guna.
- 3) Pada urusan sosial ditunjukkan oleh masih tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Permasalahannya: (a) masih rendahnya pendidikan dan tingkat kompetensi angkatan kerja; (b) belum optimalnya penanganan bencana sosial; (c) masih rendahnya penanganan kasus-kasus kekerasan anak, perempuan dan *trafficking*; (d) belum optimalnya penanganan PMKS melalui rehabilitasi sosial; (e) masih rentan terhadap konflik sosial.
- 4) Pada urusan perikanan dan kelautan ditandai oleh masih rendahnya produktivitas dan pendapatan pembudidaya ikan dan nelayan. Permasalahannya: (a) masih rendahnya akses pembudidaya ikan dan nelayan terhadap lembaga modal; (b) rendahnya penggunaan teknologi budidaya dan penangkapan; (c) belum dilaksanakannya usaha pasca panen.
- 5) Pada urusan pertanahan ditandai oleh masih tingginya kepemilikan tanah yang belum bersertifikat, sehingga banyaknya tanah belum bersertifikat; penyelesaian tanah provinsi yang dikuasai oleh masyarakat dan pihak lain. Permasalahannya adalah belum terkordinasinya program sertipikat tanah antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 6) Pada urusan pertanian ditandai oleh belum tercapainya target produksi padi daging, telur, susu dan nilai tukar petani. Permasalahannya: (a) masih terbatasnya tenaga penyuluh pertanian;

(b) tingginya alih fungsi lahan; (c) Rusaknya jaringan irigasi pertanian dan jalan usaha tani; (d) mahalnya harga benih/bibit dan sarana produksi pertanian; (e) rendahnya akses petani/peternak terhadap lembaga modal; (f) dampak perubahan iklim dan bencana alam banjir/kekeringan; (g) belum tersedianya/termanfaatkannya teknologi spesifik lokasi; (h) belum terorganisasinya lahan garapan yang sempit kedalam organisasi usaha tani yang luas; (i) masih kurangnya tenaga penyuluh pertanian dan kesejahteraannya.

- 7) Pada urusan kehutanan ditandai oleh tidak tercapainya target produksi kayu. Permasalahannya: (a) masih rendahnya kemampuan masyarakat untuk mengembangkan hutan rakyat; (b) masih kurangnya tenaga penyuluh kehutanan.
- 8) Pada urusan ketransmigrasian ditandai oleh tidak tercapainya jumlah transmigran local maupun luar Jawa Barat. Permasalahannya: (a) kurangnya rendahnya animo masyarakat untuk bertransmigrasi; (b) Masih rendahnya pemahaman kewirausahaan serta pertumbuhan ekonomi masyarakat translok.

B. Aspek Pelayanan Umum

- 1) Pada urusan pendidikan ditandai oleh belum tuntasnya wajar 12 tahun, Permasalahannya: (a) aksesibilitas terhadap sekolah belum merata di beberapa wilayah; (b) jumlah, dan kualifikasi masih kurang/rendah dan persebaran tidak merata; (c) Kemiskinan dan minimnya pengetahuan orang tua tentang arti pentingnya pendidikan bagi anaknya menjadi penyebab utama *Drop Out* (DO);
- 2) Pada urusan kesehatan ditandai oleh masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), dan masih belum optimalnya penanggulangan penyakit menular. Permasalahannya: (a) Belum optimalnya SDM bidang tenaga kesehatan terhadap pelayanan; (b) Tidak meratanya penyebaran tenaga kesehatan; (c) Belum optimalnya sarana & prasarana kesehatan baik secara kuantitatif maupun kualitatif; (d) Rendahnya kesadaran dan tanggung jawab

masyarakat untuk memelihara lingkungan sehat, (e) masih kurangnya pendekatan *preventif* untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; serta (f) masih rendahnya pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat miskin.

- 3) Pada urusan pekerjaan umum ditandai oleh masih rendahnya tingkat ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan, belum tuntasnya pembangunan infrastruktur strategis, dan pengendalian banjir. Permasalahannya: (a) belum optimalnya penyediaan fasilitas perlengkapan jalan; (b) belum tuntasnya pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur strategis antara lain jalan tol dan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB); (c) belum tuntasnya penanganan banjir dan kerusakan jaringan irigasi; (d) makin terbatasnya sumber air baku untuk air minum; (e) terbatasnya kualitas dan kuantitas infrastruktur di perdesaan.
- 4) Pada urusan perumahan ditandai oleh tidak terleasisasinya program rumah tidak layak huni. Permasalahannya penerima hibah dari pemerintah daerah provinsi Jawa Barat harus berbadan hukum.
- 5) Pada urusan koperasi, usaha kecil dan menengah ditandai oleh tercapainya seluruh indikator. Permasalahannya: (a) belum optimalnya akses pelaku KUMKM terhadap lembaga permodalan; (b) masih rendahnya manajemen usaha; (c) belum optimal peningkatan jumlah wirausahawan baru.
- 6) Pada urusan kependudukan dan catatan sipil ditandai oleh masih tingginya urbanisasi, penduduk yang belum mempunyai dokumen akte kelahiran,. Permasalahannya: (a) kesempatan kerja di perdesaan masih rendah; (b) belum optimalnya pelayanan kependudukan; (c) pengendalian penduduk melalui layanan posyandu terkendala oleh peraturan yang mengharuskan hibah kepada lembaga yang berbadan hukum.
- 7) Pada urusan keluarga berencana ditandai oleh masih tingginya laju pertumbuhan penduduk. Permasalahannya adalah masih rendahnya

Wawasan tentang program ketahanan keluarga; rendahnya capaian kuantitas dan kualitas kesertaan dalam program KB serta peran aktif peserta pria.

- 8) Pada urusan komunikasi dan informatika ditandai oleh masih rendahnya jumlah penduduk yang melek TIK. Permasalahannya: (a) kurang meratanya layanan jaringan data internet; (b) masih rendahnya pemahaman tentang penerapan standardisasi bagi Lembaga Penyiaran Radio Swasta dan penerapan standarisasi telekomunikasi bagi *Reseller* Perangkat Telekomunikasi; (c) belum optimalnya pemanfaatan lembaga komunikasi dan informasi sebagai media penyebarluasan informasi.
- 9) Pada urusan pertanahan ditandai oleh kurangnya jumlah aset tanah milik Pemerintah provinsi yang disertifikatkan. Permasalahannya adalah belum maksimalnya inventarisasi data aset tidak bergerak milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat
- 10) Pada urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, keuangan daerah, kepegawaian dan persandian ditandai oleh tidak tercapainya target skala kepuasan masyarakat terhadap layanan Pemerintahan, skala komunikasi organisasi pemerintahan, tingkat partisipasi pemelihan umum. Permasalahannya: (a) belum optimalnya pelayanan publik; (b) belum optimalnya sosialisasi kebijakan dan program pemerintah terhadap masyarakat; (c) masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses politik; (d) masih rendahnya kapasitas dan profesionalisme SDM aparatur; (e) belum tuntasnya pelaksanaan reformasi birokrasi.
- 11) Pada urusan statistik, ditandai dengan masih rendahnya tingkat kontribusi hasil analisis data/penelitian/kajian dalam perencanaan pembangunan, Permasalahannya: (a) minimnya data yang terkumpul dari kabupaten/kota, OPD; (b) referensi data pembangunan beragam yang berkaitan dengan dukungan basis data pembangunan Jawa

- Barat. (c) rendahnya data/penelitian/kajian yang sesuai dengan kebutuhan perencanaan.
- 12) Pada urusan Kearsipan, permasalahannya: (a) belum optimal tata kelola kearsipan dinamis di OPD Provinsi Jawa Barat; (b) belum tertibnya implementasi penyusutan arsip oleh masing-masing OPD; (c) belum dimanfaatkan secara optimal keberadaan record center (pusat penyimpanan arsip di masing-masing OPD) Provinsi Jawa Barat; (d) masih rendah apresiasi terhadap penelusuran dan penyelamatan arsip bernilai kesejarahan; (e) belum memadainya sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia pengelola kearsipan.
- 13) Pada urusan Perpustakaan, ditandai oleh tidak tercapainya jumlah judul koleksi bahan perpustakaan, dan belum optimalnya pengelolaan perpustakaan. permasalahannya: (a) kurang tersedianya dana untuk pengadaan koleksi buku; (b) belum optimalnya pemanfaatan *record center* di masing-masing OPD belum optimal; dan (c) keterbatasan sarana dan prasarana; keterbatasan tenaga fungsional pengelola perpustakaan.
- 14) Pada urusan Energi dan Sumber Daya Mineral ditandai oleh tercapainya seluruh indikator, namun demikian masih terdapat permasalahan: (a) terbatasnya pemanfaatan energi baru terbarukan, serta belum optimalnya konservasi energi dan sumber daya mineral; (b) tumpang tindih lahan antara lahan yang diperuntukkan untuk instalasi panas bumi dengan lahan konservasi (hutan konservasi).

C. Aspek Daya Saing Daerah

- 1) Pada urusan lingkungan hidup ditandai oleh belum tercapainya target capaian fungsi kawasan lindung terhadap luas wilayah, masih terjadi banjir, pencemaran lingkungan. Permasalahannya: (a) belum optimalnya implementasi RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan kebijakan 45% kawasan lindung Jawa Barat; (b) masih terjadi degradasi kualitas lingkungan di hulu DAS prioritas (Citarum, Cimanuk, Ciliwung, Citanduy) sampai ke wilayah pesisir; (c) Kurang

memadainya pengaturan industri dalam penanganan limbah cair, gas, bahan beracun dan berbahaya.

- 2) Urusan penataan ruang masih terdapat permasalahan: (a) belum seluruh Kabupaten/Kota menetapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR); (b) belum optimalnya implementasi pengembangan PKN secara fungsi dan peran yang telah ditetapkan dalam RTRW Provinsi Jawa Barat, terutama yang terkait dengan skala kegiatan ekonomi, pelayanan infrastruktur, serta daya dukung dan daya tampung ruangnya.
- 3) Urusan kepemudaan dan olahraga. Permasalahannya: (a) masih kurangnya penghargaan/pengakuan terhadap prestasi pemuda dalam berbagai bidang, jumlah pemuda berprestasi skala internasional pada ajang pertukaran pemuda; (b) Belum optimal terwujudnya Kemitraan antara Pemerintah Provinsi dengan OPD Kab/Kota dan Organisasi Keolahragaan Dan Kepemudaan (41 Organisasi Kab/Kota).
- 4) Pada urusan penanaman modal ditandai oleh tidak tercapainya target penanaman modal asing. Permasalahannya: (a) gejala kondisi ekonomi global yang berimbas kepada penurunan minat investasi khususnya PMA, kondisi atau iklim investasi yang kurang kondusif, serta depresiasi nilai tukar rupiah yang berdampak terhadap kondisi ekonomi Jawa Barat; (b) belum adanya kesepakatan tentang penanggulangan masalah tenaga kerja, dalam rangka usulan Pendirian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
- 5) Pada urusan ketenagakerjaan ditandai oleh masih tingginya tingkat pengangguran terbuka dan masih rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja. Permasalahannya: (a) masih rendahnya kualitas angkatan kerja untuk bersaing dalam pasar tenaga kerja; (b) masih belum optimalnya program peningkatan ekonomi riil; (c) masih terjadi ketidaksepakatan antara buruh, pelaku usaha, dan pemerintah dalam penetapan upah minimum.

- 6) Pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ditandai oleh masih belum tercapainya target indeks pemberdayaan gender, kekerasan terhadap anak dan *trafficking*. Permasalahannya: (a) masih belum tingginya tingkat pendidikan perempuan dibanding laki-laki; (b) belum optimalnya program ketahanan keluarga.
- 7) Pada urusan perhubungan, permasalahannya: (a) belum berkembangnya sistem transportasi massal dan integrasi antar moda angkutan; (b) masih kurangnya fasilitas perlengkapan jalan dan masih tingginya overloading angkutan barang; dan (c) belum memadainya keberadaan bandara udara untuk menampung penumpang dan barang baik domestik maupun internasional.
- 8) Urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, permasalahannya: (a) pendidikan politik masyarakat masih rendah; (b) belum optimal hasil pemantauan dan pelaporan proses Pemilihan Umum Kepala Daerah legitimatif; (c) masih sering terjadi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat; (e) terbatasnya sarana dan prasarana operasional Satlinmas.
- 9) Pada urusan kebudayaan, permasalahannya: (a) masih rendahnya apresiasi, kecintaan dan perlindungan terhadap budaya local serta bahasa sunda sebagai bahasa ibu; (b) kurangnya eksplorasi, inventarisasi dan terdokumentasikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Jawa Barat; (c) belum terbentuknya skema implementasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal pada tingkatan sosial di Jawa Barat; (d) masih kurangnya apresiasi masyarakat terhadap eksistensi museum sebagai salah satu media informasi budaya, media pendidikan, obyek wisata budaya, dan sarana penelitian; (e) masih kurangnya sarana publik yang secara berkesinambungan menampilkan seni budaya daerah baik dengan fungsi pembinaan maupun fungsi media apresiasi dan ekspresi masyarakat di bidang seni budaya; (f) masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dan latar belakang seni sehingga pengelolaan aspek kesenian dirasakan belum optimal.

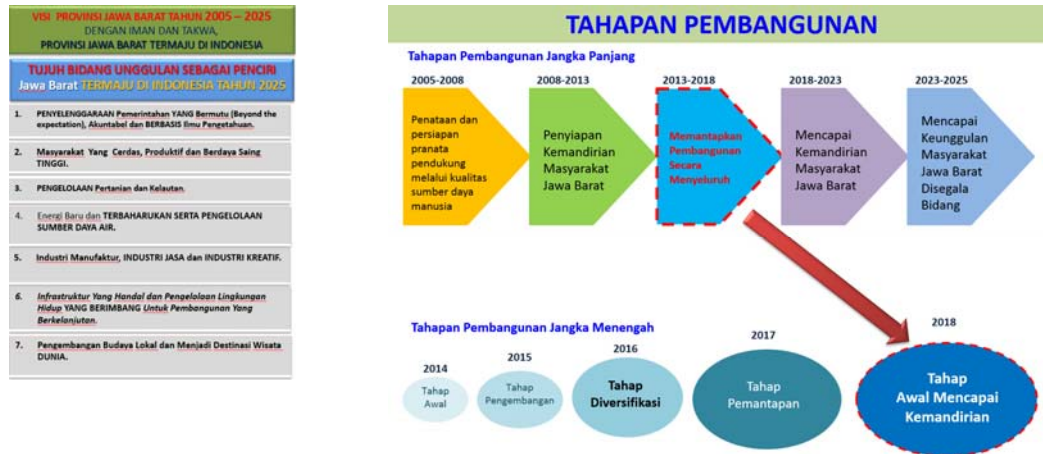
- 10) Pada urusan perindustrian ditandai oleh tidak tercapainya target jumlah sumber daya manusia industri kecil menengah (IKM) yang bersertifikat. Permasalahannya: (a) masih rendahnya kesadaran pengusaha IKM terhadap pentingnya SDM yang bersertifikat; (b) rendahnya pemahaman pelaku usaha IKM terhadap produk bersih, salah satunya sebagai dukungan program Citarum bestari; (c) masih rendahnya kreativitas dan inovasi yang dimiliki oleh pelaku usaha IKM.
- 11) Pada urusan perdagangan, permasalahannya: (a) keterbatasan aturan dan perundangan mengenai pelaksana pengelolaan Sistem Resi Gudang (SRG); (b) kurang optimalnya penanganan Perlindungan Konsumen; (c) masih terbatasnya pengawasan barang/jasa pada pasar-pasar tradisional dan toko modern serta di pusat pembelanjaan dan pertokoan.
- 12) Pada urusan pariwisata, permasalahannya: (a) belum terintegrasinya antar pemerintah dan asosiasi pariwisata maupun industri pariwisata dalam pelaksanaan pengembangan kepariwisataan di Jawa Barat; (b) masih kurangnya kualitas fasilitas pendukung pariwisata dan infrastruktur pariwisata untuk aksesibilitas menuju obyek wisata; (c) masih kurangnya Dukungan sarana dan prasarana promosi yang *representative*; (d) masih kurangnya ketersediaan sumber daya manusia kepariwisataan yang kompetitif.

Permasalahan tersebut di atas digunakan sebagai dasar rujukan dalam merumuskan isu strategis pembangunan Jawa Barat Tahun 2018, yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

2.2.4 Rekomendasi

Tahun 2018 merupakan masa akhir pemberlakuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat 2013-2018, yang mengemban tema: “Memantapkan Pembangunan secara menyeluruh”. Tahun 2018 juga merupakan tahun awal periode pematangan kemandirian provinsi Jawa Barat dalam kerangka Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat 2005-2025, dengan visi: “Dengan Iman dan Takwa, Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia”.



Gambar 2.1 Visidan Pentahapan Pembangunan Provinsi Jawa Barat 2005-2025

Hal penting yang perlu mendapat perhatian pada penyusunan rencana pembangunan pada tahun 2018 adalah: Pertama, pendanaan untuk kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan Tahun 2018 (RPJMD 2013-2018) termasuk pemenuhan Janji Kampanye Gubernur selama periode tahun 2013-2018. Pada tahun 2018 semua program dan kegiatan yang berkaitan dengan janji kampanye gubernur harus dituntaskan.

Kedua, pendanaan untuk kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan nasional (RPJMN 2015-2019), berupa kebijakan nasional yang sudah ditetapkan dilaksanakan di provinsi Jawa Barat diantaranya pembangunan proyek-proyek strategis nasional, yang mensyaratkan pengalokasian dana pendamping, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat; termasuk didalam kategori ini adalah pemenuhan kewajiban pengalokasian 20% volume APBD untuk fungsi pendidikan; 10% untuk fungsi kesehatan; pendanaan pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs); penerapan Good Governance.

Ketiga, kegiatan yang merupakan kewajiban Provinsi (merujuk UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Keempat, Bantuan Keuangan ke seluruh Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Barat, Bantuan Desa, Hibah kepada stake holder pembangunan, Bantuan Sosial (Bansos) kepada warga masyarakat yang membutuhkan dan Subsidi.

Kelima, pendanaan bagi Pendukung Pelaksanaan Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan pada tingkat provinsi dan pada 16 (enam belas) pilkada Bupati dan Walikota.

Keenam, Pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditentukan oleh pemerintah pusat untuk pemerintah daerah. Ketujuh, Kegiatan fixed cost dan pelayanan dasar PD.

Kedelapan, Pendukung Penyelenggaraan Asian Games Ke XVIII. Dan pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berprestasi.

Kesembilan, Pengeluaran Pembiayaan untuk Penyertaan modal di BUMD-BUMD milik pemerintah provinsi Jawa Barat dan pengalokasian Kredit Cinta Rakyat (KCR).